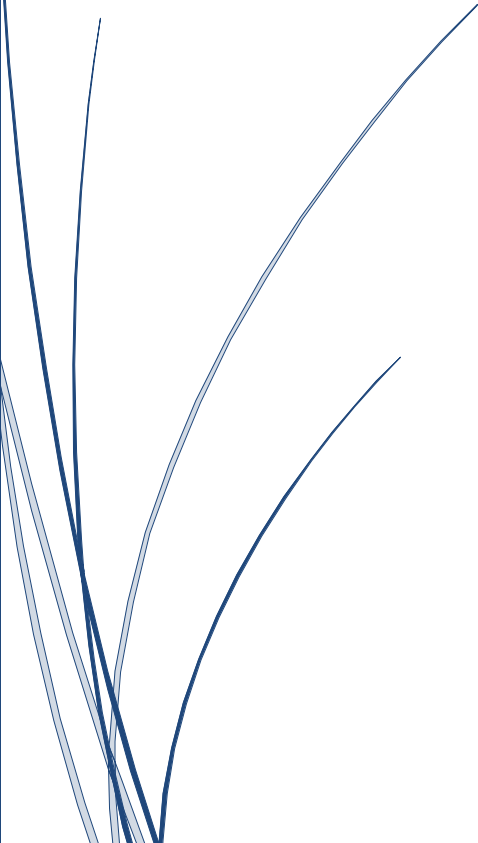




RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2026

Kota Administrasi Jakarta Barat



KATA PENGANTAR

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan dimasa depan yang tepat melalui urutan dengan memperhatikan sumberdaya yang tersedia baik sumberdaya manusia, dana, waktu, kepentingan dan skala prioritas.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 merupakan rencana pembangunan untuk jangka menengah daerah tahun 2023-2026. RPD dimaksud selanjutnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu Tahun 2023-2026. Oleh karena itu, sebagai suatu Perangkat Daerah yang mendukung kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026.

Beberapa pendekatan proses mulai dari politis, teknokratis, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas, telah dilalui dengan berbagai dinamika prosesnya baik dalam penyusunan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 maupun penyusunan Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023-2026. Pada tatanan implementasi, tentunya Renstra ini sangat membutuhkan kolaborasi bersama baik di lingkungan pemerintah daerah maupun dengan para pemangku kepentingan.

Pada akhirnya, Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023-2026 ini diharapkan mampu menjadi landasan kita bersama dalam mewujudkan cita-cita pembangunan di Kota Administrasi Jakarta Barat yang tentunya juga untuk Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, Juni 2022

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



Yani Wahyu Purwoko, A.P., M.Si.
NIP 197302241993111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I	
PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-8
1.4 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Rencana Daerah	I-9
1.5 Sistematika Penulisan	I-10
BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.1.1. Tugas.....	II-1
2.1.2. Fungsi.....	II-1
2.1.3. Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Barat.....	II-3
2.2 Sumber Daya Kota Administrasi Jakarta Barat	II-24
2.2.1. Sejarah Kota Administrasi Jakarta Barat	II-24
2.2.2. Kondisi Geografis	II-24
2.2.3. Sumber Daya Manusia	II-25
2.2.4. Aset Yang Dimiliki.....	II-34
2.2.5. Kondisi Ketentraman dan Ketertiban	II-36
2.2.6. Kondisi Perekonomian.....	II-40
2.3 Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat	II-42
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat	II-48
BAB III	
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023-2026	III-6
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-13
3.3.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	III-13
3.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	III-16
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-18
BAB IV	
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH	IV-1
4.1. Tujuan	IV-1
4.2. Sasaran Program Dan Indikator Kinerja Tahun 2023-2026	IV-3
BAB V	
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI	
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII	
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII	
PENUTUP	VIII-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Renstra dengan Dokrenda	I-10
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Barat.....	II-24
Gambar 2.2.	Peta Administrasi Kota Jakarta Barat.....	II-25
Gambar 2.3.	Data Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-27
Gambar 2.4.	Data Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat Berdasarkan Usia	II-28
Gambar 2.5.	Grafik Jumlah Penduduk	II-29
Gambar 3.1.	Peta Rencana Pola Ruang Kota Administrasi Jakarta Barat	III-15
Gambar 3.2.	Peta Rencana Pola Struktur Ruang Kota Administrasi Jakarta Barat.....	III-16

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Data Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat Berdasarkan Jumlah Pegawai.....	II-26
Tabel 2.2.	Data Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat Berdasarkan Jabatan dan Unit Kerja	II-26
Tabel 2.3.	Jumlah Penduduk Kecamatan Cengkareng Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester 2 Tahun 2021	II-30
Tabel 2.4.	Jumlah Penduduk Kecamatan Grogol Petamburan Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester 2 Tahun 2021	II-30
Tabel 2.5.	Jumlah Penduduk Kecamatan Taman Sari Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester 2 Tahun 2021	II-31
Tabel 2.6.	Jumlah Penduduk Kecamatan Tambora Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester 2 Tahun 2021	II-31
Tabel 2.7.	Jumlah Penduduk Kecamatan Kebon Jeruk Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester 2 Tahun 2021	II-32
Tabel 2.8.	Jumlah Penduduk Kecamatan Kalideres Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester 2 Tahun 2021	II-33
Tabel 2.9.	Jumlah Penduduk Kecamatan Palmerah Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester 2 Tahun 2021	II-33
Tabel 2.10.	Jumlah Penduduk Kecamatan Kembangan Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester 2 Tahun 2021	II-34
Tabel 2.11.	Data Aset Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat	II-35
Tabel 2.12.	Data Penindakan PSBB Tahun 2020	II-37
Tabel 2.13.	Data Penindakan PPKM Tahun 2021.....	II-39
Tabel 2.14.	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (ribu rupiah), 2017-2021	II-40
Tabel 2.15.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2019-2021	II-41
Tabel 2.16.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat dari Tahun 2018 – 2022 ..	II-43
Tabel 2.17.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat dari Tahun 2018 – 2022.....	II-47
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan.....	III-3
Tabel 3.2.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pencapaian Misi Pembangunan 2023-2026	III-11
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	IV-4
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program Kota Administrasi Jakarta Barat.....	V-1
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah	VI-5
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan	VII-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah prinsipnya memiliki tujuan untuk mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Agar pembangunan daerah dimaksud memiliki landasan dan koridor yang jelas, maka telah diatur bahwa setiap pemerintah daerah agar menyusun suatu rencana pembangunan di daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah. Rencana pembangunan daerah dimaksud meliputi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selain dari dokumen rencana pembangunan daerah dimaksud, setiap Organisasi Perangkat Daerah, juga perlu menyusun dokumen rencana pembangunan daerah yang terdiri dari, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk jangka waktu 1 tahun. Renstra-PD dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD. Adapun muatan di dalam Renstra-PD yaitu tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan salah satu Kota Administrasi sekaligus Perangkat Daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta). Sebagai unsur pembantu Gubernur, Kota Administrasi Jakarta Barat mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan gubernur sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk dapat memastikan agar Kota Administrasi Jakarta Barat mampu mendukung secara optimal, efektif dan efisien dalam membantu pelaksanaan tugas Gubernur untuk pembangunan jangka menengah, maka Kota Administrasi Jakarta Barat perlu untuk menyusun Dokumen Renstra-PD.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, salah satu amanat nya adalah akan dilaksanakannya Pemilu Kepala Daerah serentak secara Nasional pada tahun 2024. Mengingat masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan berakhir pada tahun 2022, maka terhadap kekosongan jabatan tersebut akan diisi dengan Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta sejak tahun 2022 hingga dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta hasil Pilkada serentak tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Mengacu pada DIKTUM KESATU Instruksi Menteri Dalam Negeri dimaksud, maka Provinsi DKI Jakarta telah diinstruksikan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah

Provinsi Tahun 2023-2026. Selain dari dokumen dimaksud, maka seluruh Kepala PD juga diinstruksikan untuk menyusun dokumen Renstra-PD Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023-2026 yang telah dilakukan secara proses dilakukan secara simultan dengan penyusunan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023-2026 yang memuat tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program/kegiatan/sub kegiatan, dan kinerja urusan, selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kota Administrasi Jakarta Barat setiap tahunnya mulai tahun 2023. Adapun tahapan penyusunan Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Persiapan penyusunan rancangan Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat;
- 2) Penyusunan rancangan Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat;
- 3) Konsultasi publik (forum PD);
- 4) Penyusunan rancangan akhir Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat dan
- 5) Penetapan Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat.

Melalui tahapan proses dimaksud, Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023-2026 diharapkan mampu untuk menjawab permasalahan-permasalahan aktual yang ada saat ini dengan tetap memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang berkaitan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga, pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan urusan pemerintahan umum (mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan gubernur) dengan memperhatikan keselarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap PD, dapat terwujud untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

1.2 Landasan Hukum

Untuk menjaga agar penyusunan Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023-2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, beberapa peraturan perundangan yang dipedomani dalam prosesnya antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan perundangan nomor 1 tahun 2020 tentang Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

- 12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 17) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 18) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 19) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 27) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 28) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
- 29) Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
- 30) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
- 31) Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;
- 32) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 33) Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026
- 34) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
- 35) Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi;
- 36) Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2017 tentang pelimpahan Wewenang Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Gubernur kepada Kota Administrasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah:

- 1) Memberikan gambaran arah kebijakan dan program dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kota Administrasi Jakarta Barat;

- 2) Sebagai penjabaran implementasi dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026;
- 3) Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Kota Administrasi Jakarta Barat dalam melaksanakan fungsinya.

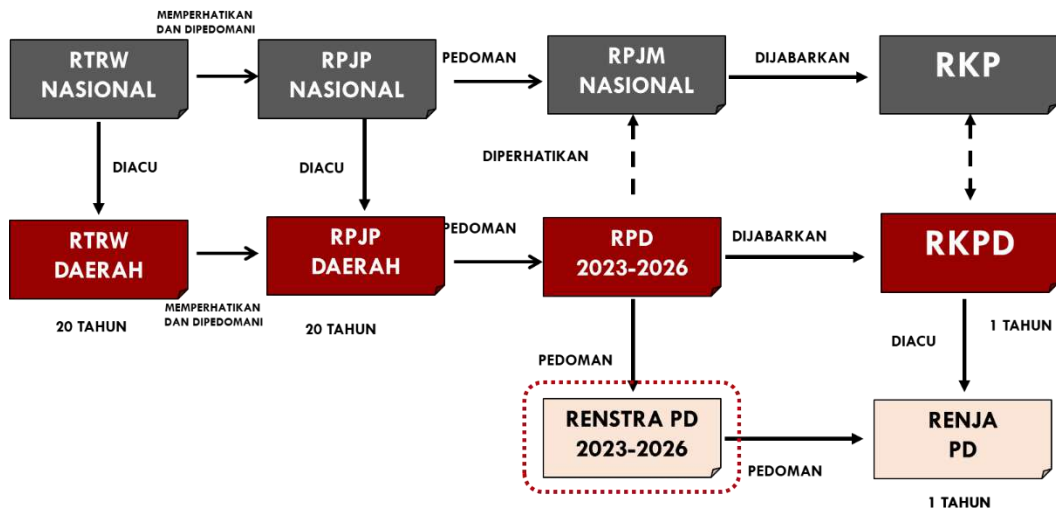
Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah:

- 4) Menjamin keselarasan tujuan dan sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dengan tujuan dan sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023-2026;
- 5) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- 6) Sebagai tolak ukur keberhasilan Kota Administrasi Jakarta Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya

1.4 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Rencana Daerah

Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023-2026 sangat terkait dengan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Renstra ini juga akan dijadikan pedoman bagi Kota Administrasi Jakarta Barat dalam penyusunan Renja Kota Administrasi Jakarta Barat mulai tahun 2023-2026. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dengan Dokrenda



Berdasarkan gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta periode 2023-2026 dan selanjutnya Dokumen Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta Anggaran tahunan Kota Administrasi Jakarta Barat dalam dokumen Renja dan RKA.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Rencana Daerah Lainnya
5. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum yang meliputi kondisi geografis, demografis, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban umum, dan lainnya. Selain itu, pada bab ini akan diuraikan terkait tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, lingkup pelayanan, mitra pelayanan, dan capaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2017-2022.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kota Administrasi Jakarta Barat

Dalam bab permasalahan dan isu strategis akan diuraikan terkait permasalahan yang ada di Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan gambaran umum dan pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat. Adapun isu strategis akan ditentukan berdasarkan sintesa dari isu strategis lingkup internasional, nasional, regional, lokal, dan rumusan permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Bab IV Tujuan dan Sasaran Kota Administrasi Jakarta Barat

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Barat. Tujuan adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis Perangkat Daerah dengan memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Barat, serta isu strategis faktual yang ada.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kota Administrasi Jakarta Barat. Strategi adalah Langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah, rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan

pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Bab VI Rencana Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menguraikan rencana program/kegiatan/Sub Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan kinerja capaian program/kegiatan/sub kegiatan periode sebelumnya, isu strategis, dan lainnya serta berpedoman pada Kepmendagri Nomor 050-5889/2021.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023-2026 sesuai sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bab VIII Penutup

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT****2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, Kota Administrasi Jakarta Barat berkedudukan sebagai unsur pembantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Dalam kedudukannya sebagai unsur pembantu Gubernur, Kota Administrasi Jakarta Barat mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Kota Administrasi Jakarta Barat mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi, menetapkan kebijakan Operasional penyelenggaraan pemerintahan Kota Administrasi, memimpin, mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan, mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di tingkat Kota Administrasi, Memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana di tingkat Kota Administrasi, Mengembangkan kerja sama dan koordinasi dengan PD/ UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi;

- 2) pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi;
- 3) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
- 4) pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;
- 5) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 6) pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- 7) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 8) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
- 9) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kota Administrasi;
- 10) pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
- 11) pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
- 12) pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi;
- 13) pelaksanaan dan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi;
- 14) pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota;
- 15) pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kota Administrasi;
- 16) fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD;
- 17) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi; dan
- 18) pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/jatau Sekretaris Daerah.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kota Administrasi Jakarta Barat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Gubernur untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.

2.1.3. Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Barat

Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Barat terdiri dari :

- 1) Walikota;
- 2) Wakil Walikota;
- 3) Sekretariat Kota, terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
 - a) Subbagian Bina Pemerintahan;
 - b) Subbagian Tata Praja; dan
 - c) Subbagian Administrasi Pemerintahan.
 2. Bagian Hukum, terdiri dari:
 - a) Subbagian Pelayanan Hukum;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum; dan
 - c) Subbagian Publikasi Hukum dan HAM.
 3. Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik, terdiri dari:
 - a) Subbagian Kepegawaian;
 - b) Subbagian Tatalaksana; dan
 - c) Subbagian Pelayanan Publik.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 1. Bagian Perekonomian, terdiri dari:
 - a) Subbagian Pariwisata, Pangan, Kelautan dan Pertanian;
 - b) Subbagian Perindustrian, Perdagangan dan KUKM; dan
 - c) Subbagian Perhubungan dan Tenaga Kerja.
 2. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a) Subbagian Pekerjaan Umum;
 - b) Subbagian Penataan Ruang dan Pertanahan dan Perumahan;
dan
 - c) Subbagian Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau.
- c. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
- 1. Bagian Umum dan Protokol, terdiri dari:
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Subbagian Rumah Tangga; dan
 - c) Subbagian Protokol.
 - 2. Bagian Keuangan, terdiri dari:
 - a) Subbagian Program dan Anggaran;
 - b) Subbagian Tata Usaha Keuangan; dan
 - c) Subbagian Perbendaharaan.
 - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan;
 - b) Subbagian Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual;
 - c) Subbagian Kesehatan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.
- 4) Kecamatan, terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Wakil Camat;
 - c. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Program dan Anggaran; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
 - d. Seksi Pemerintahan;
 - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - g. Kelurahan, terdiri dari :
 - 3. Lurah;
 - 4. Wakil Lurah;

5. Sekretariat Kelurahan;
 - a) Seksi Pemerintahan;
 - b) Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c) Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - d) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun uraian Tugas dan Fungsi dari masing-masing jabatan struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1) Walikota mempunyai tugas:

- Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi;
- Menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan Kota Administrasi;
- Memimpin, mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan;
- Mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di tingkat Kota Administrasi;
- Memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana di tingkat Kota Administrasi;
- Mengembangkan kerja sama dan koordinasi dengan PD/ UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi.

2) Wakil Walikota mempunyai tugas:

- Membantu walikota dalam melaksanakan tugas;
- Mewakili Walikota apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Walikota; dan
- Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Walikota.

3) Sekretariat Kota menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi;

- Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi;
- Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi;
- Pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja, Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi;
- Perumusan kebijakan, bisnis proses, standar dan prosedur Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- Pengoordinasian perumusan kebijakan, bisnis proses, standar dan prosedur Kota Administrasi;
- Pengoordinasian dan pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik Kota Administrasi;
- Pengoordinasian dan pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan keuangan Kota Administrasi;
- Pengoordinasian dan penyusunan pelaporan Kota Administrasi;
- Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
- Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan, rehab total, rehab berat, rehab sedang dan rehab ringan gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan termasuk rumah dinas Camat dan Lurah;
- Pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di tingkat Kota Administrasi;
- Pengoordinasian dan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
- Pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD di tingkat Kota Administrasi;
- Pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan mental spiritual di tingkat Kota Administrasi;
- Pengoordinasian Dewan Kota;

- Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
- Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota.

Selanjutnya untuk UKPD bidang pemerintahan tingkat Kota Administrasi terdiri atas:

- Inspektur Pembantu Kota Administrasi;
- Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota;
- Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi;
- Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi;
- Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi;
- Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi;
- Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi;
- Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi; dan
- Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris Kota dibantu oleh Asisten sebagai berikut:

- a. Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kota dalam :
 - Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi bidang pemerintahan;
 - Mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan administrasi kepegawaian Kota Administrasi;
 - Mengoordinasikan pelaksanaan bidang kesatuan bangsa dan penataan dan pengembangan wilayah dan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kota Administrasi;
 - Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
 - Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan, rehab total, rehab berat, rehab sedang dan rehab ringan

gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan termasuk rumah dinas Camat dan Lurah;

- Mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD bidang Pemerintahan di tingkat Kota Administrasi;
- Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD bidang Pemerintahan di tingkat Kota Administrasi;
- Mendukung kegiatan pelayanan pajak di wilayah Kota Administrasi;
- Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
- Fungsi Kota Administrasi sesuai lingkup tugasnya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

Asisten Pemerintahan terdiri dari:

1. Bagian Pemerintahan yang memiliki fungsi :

- Penyusunan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- Perumusan kebijakan, bisnis proses, standar dan prosedur Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- Penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian di wilayah Kota Administrasi;
- Pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian di wilayah Kota Administrasi;
- Pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian di wilayah Kota Administrasi;

- Pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- Pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian di wilayah Kota Administrasi;
- Pengoordinasian, pembinaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
- Penataan dan pengembangan wilayah di wilayah Kota Administrasi;
- Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan, rehab total, rehab berat, rehab sedang dan rehab ringan gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan termasuk rumah dinas Camat dan Lurah di tingkat Kota Administrasi;
- Pengoordinasian lembaga kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan di tingkat Kota Administrasi;
- Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi dan asosiasi pemerintah Kota;
- Pengordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan umum;
- Pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tingkat Kota Administrasi;
- Pengoordinasian dan pemantauan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kota Administrasi;
- Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sesuai lingkup tugasnya;
- Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan

- Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang dibertkan oleh Sekretaris Kota dan/atau Asisten Pemerintahan.

2. Bagian Hukum yang memiliki fungsi:

- Penyusunan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- Perumusan kebijakan, bisnis proses, standar dan prosedur Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- Penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan pengelolaan hukum Kota Administrasi;
- Pelaksanaan pelayanan perkara non litigasi bidang non aset di wilayah Kota Administrasi;
- Pelaksanaan bantuan hukum perkara litigasi bidang non aset di wilayah Kota Administrasi;
- Pelaksanaan penyuluhan hukum dan pembinaan Hak Asasi Manusia
- Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sesuai lingkup tugasnya;
- Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

3. Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik yang memiliki fungsi:

- Penyusunan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- Perumusan kebijakan, bisnis proses, standar dan prosedur Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian Kota Administrasi;

- Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan ketatalaksanaan Kota Administrasi;
 - Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan pelayanan publik Kota Administrasi;
 - Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - Pengoordinasian, penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Key Performance Indicator dan perjanjian kinerja Kota Administrasi;
 - Pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur Kota Administrasi;
 - Pengoordinasian dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi;
 - Penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di wilayah Kota Administrasi;
 - Pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian di wilayah Kota Administrasi;
 - Pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian di wilayah Kota Administrasi;
 - Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sesuai lingkup tugasnya;
 - Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
 - Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kota dan/ atau Asisten Pemerintahan.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan tugas membantu Sekretaris Kota dalam:
- Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi bidang ekonomi dan pembangunan;

- Mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD bidang Perekonomian dan UKPD bidang Pembangunan di tingkat Kota Administrasi;
- Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran bidang Perekonomian dan UKPD bidang Pembangunan di tingkat Kota Administrasi;
- Mengoordinasikan fasilitasi pelaksanaan pengoordinasian dan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/ Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD;
- Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi sesuai lingkup tugasnya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kota.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:

1. Bagian Perekonomian, mempunyai fungsi:

- Penyusunan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- Perumusan kebijakan, bisnis proses, standar dan prosedur Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- Penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebij akan operasional pelaksanaan urusan pangan, kelautan dan perikanan, pertanian, pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang mineral dan batubara, energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan), perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan perhubungan di wilayah Kota Administrasi;
- Pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pangan, kelautan dan perikanan, pertanian, pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang mineral dan batubara, energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan),

perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan perhubungan di wilayah Kota Administrasi;

- Pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan pangan, kelautan dan perikanan, pertanian, pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang mineral dan batubara, energi baru terbarukan dan ketenagalisulkan), perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan perhubungan di wilayah Kota Administrasi;
- Pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan pangan, kelautan dan perikanan, pertanian, pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang mineral dan batubara, energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan), perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan perhubungan di wilayah Kota Administrasi;
- Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sesuai lingkup tugasnya;
- Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
- Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kota dan/atau Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

2. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- Penyusunan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- Perumusan kebijakan, bisnis proses, standar dan prosedur Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- Penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi), lingkungan

hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan di wilayah Kota Administrasi;

- Pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi), lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan di wilayah Kota Administrasi;
 - Pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi), lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan di wilayah Kota Administrasi;
 - Pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi), lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan di wilayah Kota Administrasi;
 - Fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum kepada pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atau Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 - Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sesuai lingkup tugasnya;
 - Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
 - Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kota dan/atau Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- c. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Kota dalam:
- Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi bidang administrasi dan kesejahteraan rakyat;

- Mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat di tingkat Kota Administrasi;
- Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD bidang Kesejahteraan Rakyat di tingkat Kota Administrasi;
- Mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran dan keuangan Kota Administrasi
- Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan mental spiritual di tingkat Kota Administrasi;
- Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi sesuai lingkup tugasnya
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kota

Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

1. Bagian Umum dan Protokol mempunyai fungsi:

- Penyusunan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- Perumusan kebijakan, bisnis proses, standar dan prosedur Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- Penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang/aset, kehumasan, data, sistem informasi Kota Administrasi;
- Pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang/aset, kehumasan, data, sistem informasi Kota Administrasi;
- Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, rehab total, rehab berat, rehab sedang dan rehab ringan gedung kantor Kota Administrasi termasuk rumah dinas;
- Pengelolaan pelayanan tamu Kota Administrasi;

- Pengurusan perjalanan Dinas Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Kota, Asisten Sekretaris Kota;
- Pengelolaan acara pimpinan Kota Administrasi;
- Pengelolaan pengamanan dalam Kompleks Kantor Walikota;
- Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sesuai lingkup tugasnya;
- Pengoordinasian dan pengelolaan data, informasi dan dokumentasi Kota Administrasi;
- Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kota dan/atau Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat.

2. Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- Penyusunan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- Perumusan kebijakan, bisnis proses, standar dan prosedur Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- Penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan pengelolaan program, anggaran dan administrasi keuangan Kota Administrasi;
- Pengoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi;
- Pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi
- Pengoordinasian dan pengelolaan administrasi keuangan Kota Administrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;

- Pengoordinasian dan pengelolaan dokumen keuangan Kota Administrasi;
 - Pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sesuai lingkup tugasnya;
 - Pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lingkup Kota Administrasi;
 - Pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan di wilayah Kota Administrasi;
 - Pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan di wilayah Kota Administrasi;
 - Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
 - Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kota dan/atau Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
- Penyusunan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - Perumusan kebijakan, bisnis proses, standar dan prosedur Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - Penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan urusan sosial, olahraga dan pemuda, perpustakaan, kearsipan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan

desa dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah Kota Administrasi;

- Pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan sosial, olahraga dan pemuda, perpustakaan, kearsipan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah Kota Administrasi;
- Pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD yang menyelenggarakan urusan sosial, olahraga dan pemuda, perpustakaan, kearsipan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah Kota Administrasi;
- Pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD yang menyelenggarakan urusan sosial olahraga dan pemuda, perpustakaan, kearsipan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah Kota Administrasi;
- Pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan mental spiritual di tingkat Kota Administrasi;
- Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sesuai lingkup tugasnya;
- Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
- Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kota dan/atau Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat.

5) Kecamatan

Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

a. Camat mempunyai tugas:

- Memimpin, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh UKPD yang ada di Kecamatan;
- Mengoordinasikan, memantau dan mendevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di tingkat Kecamatan;
- Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan PD, UKPD dan/atau instansi pemerintah pusat/swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

Adapun untuk fungsinya, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi sesuai lingkup tugas dan fungsinya;

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengoordinasian upaya penyeenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh UKPD di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi organisasi dan lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- Penetapan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
- Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, barang/ aset Kecamatan;
- Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan; dan
- Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan, Camat dibantu oleh UKPD di tingkat Kecamatan yang terdiri atas:

- UP PTSP Kecamatan;
- Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- Sektor Dinas Kecamatan;

- Satuan Pelaksana Dinas Kecamatan;
- Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan;

6) Kelurahan

Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Lurah mempunyai tugas:

- Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan;
- Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- Melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
- Melaksanakan pelayanan masyarakat Kelurahan;
- Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum Kelurahan;
- Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum Kelurahan;
- Mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di tingkat Kelurahan;
- Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan PD, UKPD dan/atau Instansi pemerintah pusat/swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan.

Kelurahan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
- Pelaksanaan pelayanan masyarakat Kelurahan;
- Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum Kelurahan;
- Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum Kelurahan;

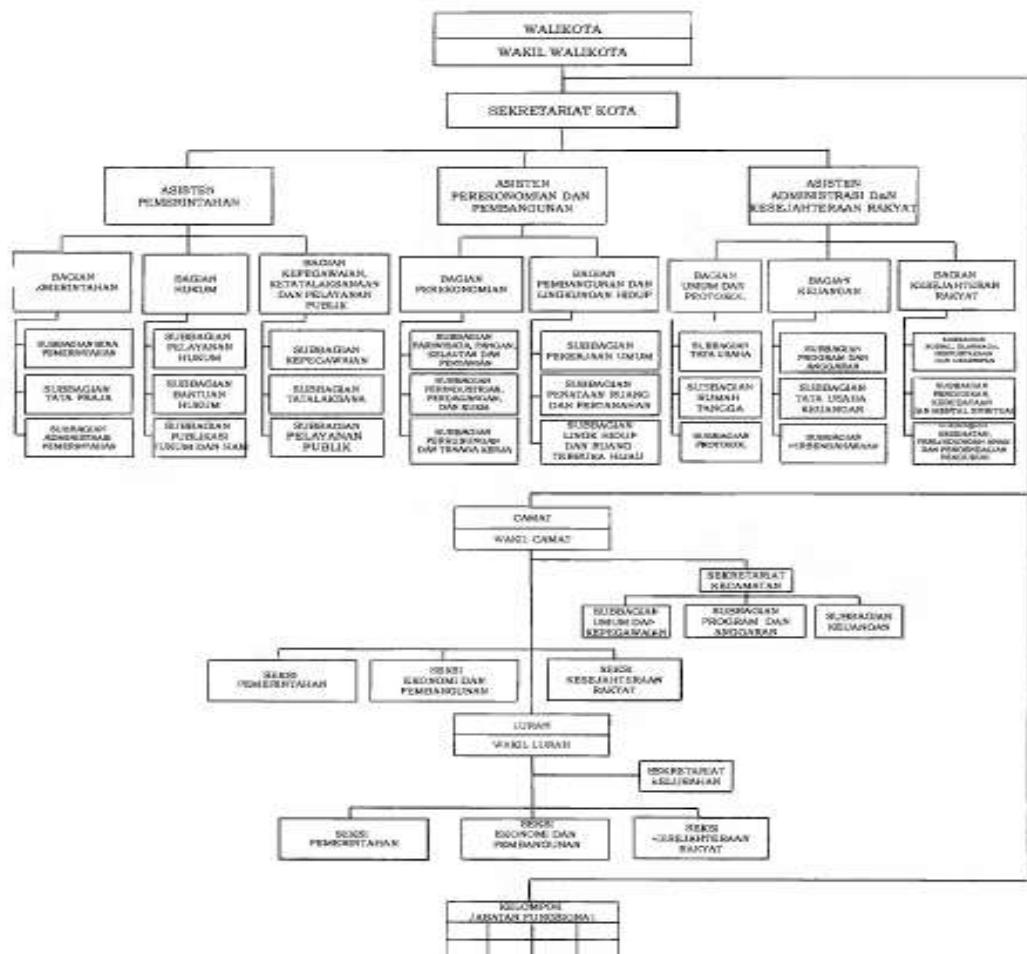
- Pembinaan dan koordinasi organisasi dan lembaga kemasyarakatan di wilayah Kelurahan;
- Pembinaan dan koordinasi rukun warga dan rukun tetangga;
- Penetapan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, barang/aset Kelurahan;
- Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan; dan
- Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kelurahan, Lurah dibantu oleh UKPD di tingkat Kelurahan terdiri atas:

- UP PTSP Kelurahan;
- Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan;
- Satuan Pelaksana Dinas Kelurahan;
- Pusat Kesehatan Masyarakat Kelurahan;

Berdasarkan uraian struktur organisasi, tugas dan fungsi yang telah dijabarkan di atas, struktur organisasi Kota Administrasi Jakarta Barat dapat tergambarkan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Barat



Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi.

2.2 Sumber Daya Kota Administrasi Jakarta Barat

2.2.1. Sejarah Kota Administrasi Jakarta Barat

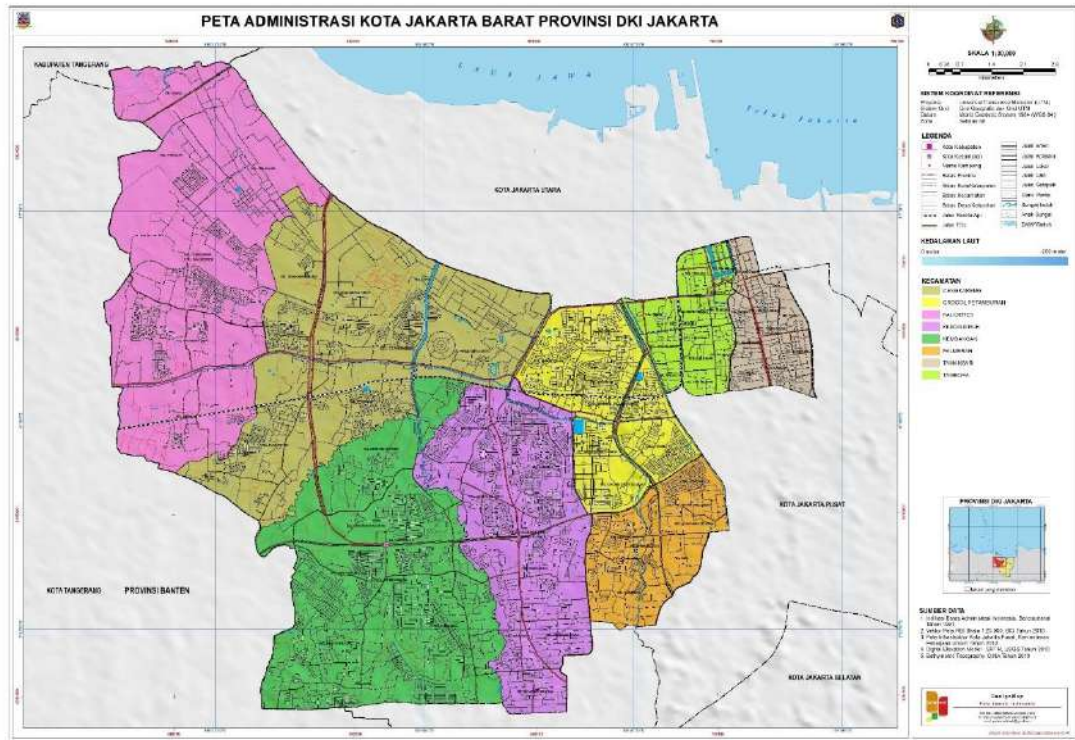
Jakarta Barat adalah salah satu dari 5 Kota Administrasi yang berada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pusat Pemerintahannya berada di Kecamatan Kembangan. Berdiri pada tahun 1966 namun Jakarta Barat resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978.

2.2.2. Kondisi Geografis

Kota Administrasi Jakarta Barat mempunyai luas wilayah : 12.615,14 Ha dan terletak antara 106 - 48 BT, 60 - 12 LU dan dibatasi oleh wilayah sebagai berikut: Sebelah Selatan: Kota Administrasi Jakarta Selatan dan

Kabupaten/Kodya Tangerang, Sebelah Barat: Kabupaten dan Kotamadya Tangerang, Sebelah Timur: Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Pusat, sedangkan Sebelah Utara: Kabupaten/Kota Madya Tangerang dan Kota Administrasi Jakarta Utara. Jakarta Barat mempunyai 8 Kecamatan, 56 Kelurahan, 578 Rukun Warga, 6.348 Rukun Tetangga.

Gambar 2.2. Peta Administrasi Kota Jakarta Barat



2.2.3. Sumber Daya Manusia

1) Sumberdaya Pegawai Negeri Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2022 sebanyak 646 orang. Distribusi jumlah pegawai dilingkup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat dengan jumlah pegawai terbanyak di Bagian Umum dan Protokol sebanyak 23 orang, disusul Bagian Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik sebanyak 16 orang. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Data Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat Berdasarkan Jumlah Pegawai

NO	UNIT	JUMLAH PEGAWAI
1	Walikota, Wakil Walikota, Sekko, Para Asisten	5
2	Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik	16
3	Bagian Hukum	12
4	Bagian Pemerintahan	13
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	12
6	Bagian Umum dan Protokol	23
7	Bagian Perekonomian	9
8	Bagian Keuangan	13
9	Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	9
10	Kecamatan	97
11	Kelurahan	437
TOTAL		646

*Sumber: Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik,
Februari 2022*

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kota Administrasi Jakarta Barat didukung oleh sebanyak 646 pegawai yang tersebar kedalam tingkat sekretariat kota, kecamatan dan kelurahan sebagai berikut :

Tabel 2.2. Data Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat Berdasarkan Jabatan dan Unit Kerja

NO	JABATAN	KECAMATAN	KELURAHAN	SETKO	JUMLAH
A	Eselon II	0	0	2	2
B	Eselon III	23	0	10	33
C	Eselon IV	44	260	20	324

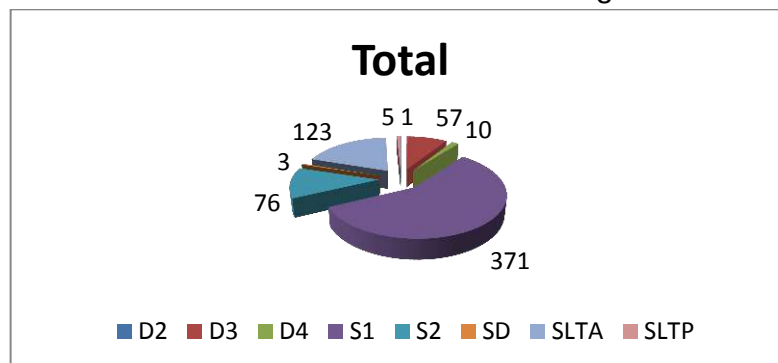
	JUMLAH PEJABAT	67	260	32	359
D	Pelaksana	30	177	80	287
	TOTAL	97	437	112	646

Sumber: Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik,
Februari 2022

Adapun demografi pegawai di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan tingkat pendidikan adalah dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 76 orang, S1 sebanyak 371 orang, setingkat Diploma IV terdapat 10 orang, D3 sebanyak 57 orang, D2 sebanyak 1 orang, lalu SMU berjumlah 123 orang, SMP berjumlah 5 orang, dan SD berjumlah 3 orang.

Data jumlah pegawai di lingkungan sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan tingkat pendidikan, sebagai berikut:

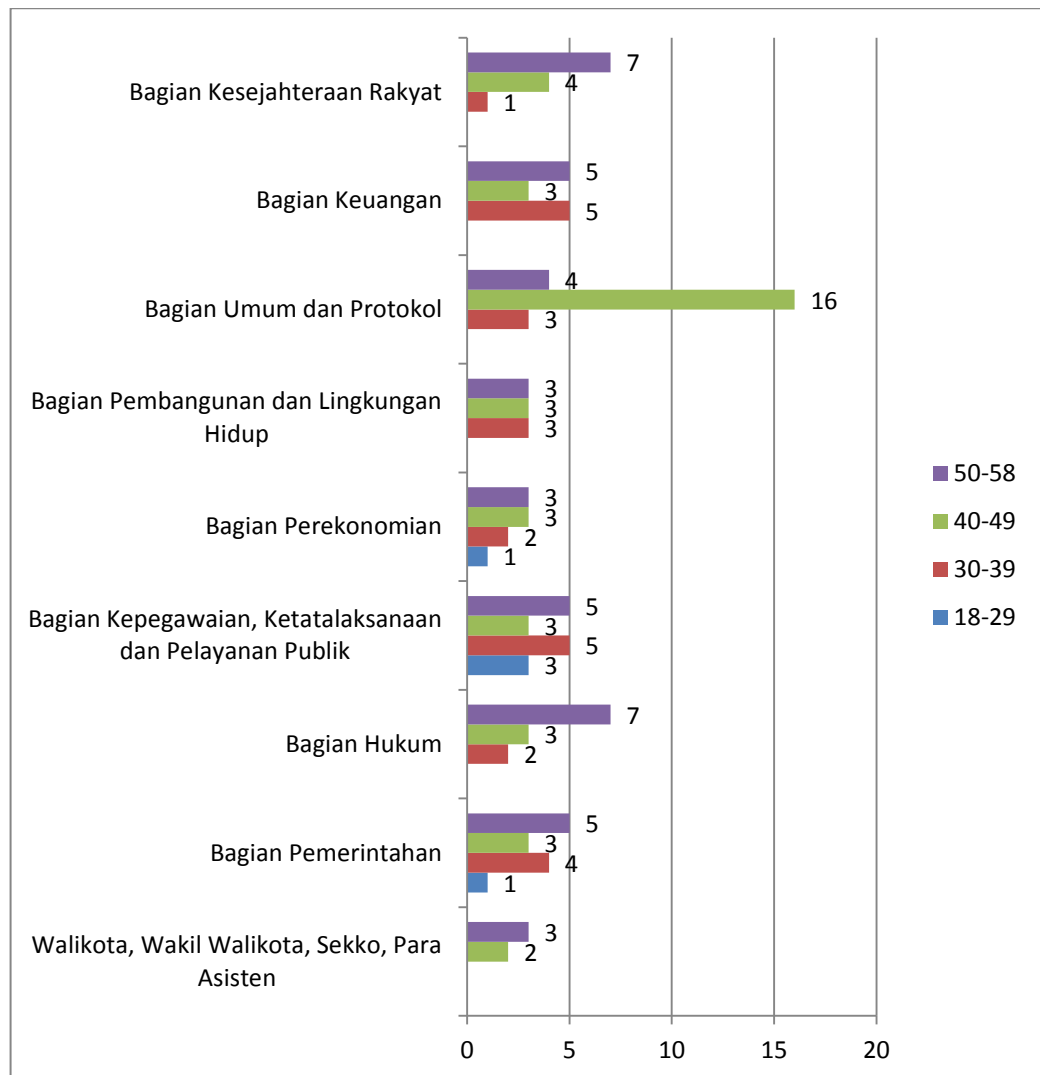
Gambar 2.3. Data Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik,
Februari 2022

Jumlah pegawai di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Gambar 2.4. Data Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat Berdasarkan Usia



Sumber: Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik,
Februari 2022

2) Sumber Daya Manusia Kota Administrasi Jakarta Barat

Berdasarkan data penduduk Tahun 2020 Kota Administrasi Jakarta Barat mempunyai jumlah penduduk 2.570.232 dengan jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar 2.569.462 dan Warga Negara Asing (WNA) sebesar 770. Jumlah KK yang terekam pada tahun 2020 sebanyak 819.866 KK. Adapun jumlah penduduk berdasarkan usia 0 sampai dengan 16 Tahun sebanyak 712.428 orang dengan jumlah laki-laki 367.612 dan jumlah perempuan 344.816 orang. Untuk Jumlah Wajib KTP untuk WNI pada tahun 2020 sebesar 1.857.039.

Sedangkan melihat data penduduk Tahun 2021 Kota Administrasi Jakarta Barat mempunyai jumlah penduduk 2.587.578 meningkat sebesar 0,67% dari tahun 2020 dengan jumlah WNI sebesar 2.586.330 dan WNA sebesar 1.248, hal ini menunjukkan adanya peningkatan warga WNI sebesar 0,66% dan peningkatan warga WNA sebesar 62,08% dibandingkan dengan data tahun 2020. Jumlah KK yang terekam pada tahun 2021 terlihat meningkat sebesar 1,19% dari tahun 2020 dengan jumlah KK sebanyak 829.590 KK. Begitu juga dengan data Jumlah Wajib KTP untuk WNI meningkat sebesar 3,21% dari tahun 2020 dengan data Jumlah Wajib KTP WNI sebesar 1.916.654.

Gambar 2.5. Grafik Jumlah Penduduk



Sumber: Seksi Data Informasi Dan Pengawasan Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat

3) Sumber Daya Manusia Per Kecamatan

a. Kecamatan Cengkareng

Kecamatan Cengkareng terdiri dari 6 Kelurahan berdasarkan hasil data konsolidasi Kementerian Dalam Negeri sampai dengan Semester 2 Tahun 2021 adalah sebanyak 584.152 jiwa yang terdiri dari 295.550 jiwa laki-laki dan 288.602 jiwa perempuan, adapun rinciannya dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Kecamatan Cengkareng Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester 2 Tahun 2021

NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH WAJIB KTP
		L	P	L+P	
1	CENGKARENG BARAT	41.899	41.365	83.264	61.620
2	DURI KOSAMBI	50.288	49.747	100.035	72.477
3	RAWA BUAYA	41.667	40.478	82.145	59.874
4	KEDAUNG KALI ANGKE	21.023	20.290	41.313	30.291
5	KAPUK	88.343	85.200	173.543	124.464
6	CENGKARENG TIMUR	52.330	51.522	103.852	75.264
	KEC. CENGKARENG	295.550	288.602	584.152	423.990

Sumber: Seksi Data Informasi Dan Pengawasan Suku Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat

b. Kecamatan Grogol Petamburan

Kecamatan Grogol Petamburan terdiri dari 7 Kelurahan berdasarkan hasil data konsolidasi Kementerian Dalam Negeri sampai dengan Semester 2 Tahun 2021 adalah sebanyak 48.161 jiwa yang terdiri dari 24.352 jiwa laki-laki dan 23.809 jiwa perempuan, adapun rinciannya dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Kecamatan Grogol Petamburan Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester 2 Tahun 2021

NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH WAJIB KTP
		L	P	L+P	
1	GROGOL	10.123	10.252	20.375	15.804
2	TANJUNG DUREN UTARA	9.910	10.560	20.470	15.935
3	TOMANG	17.870	17.965	35.835	27.646
4	JELAMBAR	17.875	18.509	36.384	28.243
5	TANJUNG DUREN SELATAN	14.984	15.763	30.747	23.854
6	JELAMBAR BARU	23.212	23.493	46.705	35.751
7	WIJAYA KUSUMA	24.352	23.809	48.161	36.327
	KEC. GROGOL PETAMBURAN	118.326	120.351	238.677	183.560

Sumber: Seksi Data Informasi Dan Pengawasan Suku Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat

c. Kecamatan Taman Sari

Kecamatan Taman Sari terdiri dari 8 Kelurahan berdasarkan hasil data konsolidasi Kementerian Dalam Negeri sampai dengan Semester 2 Tahun 2021 adalah sebanyak 128.256 jiwa yang terdiri dari 63.961 jiwa laki-laki dan 64.295 jiwa perempuan, adapun rinciannya dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Kecamatan Taman Sari Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester 2 Tahun 2021

NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH WAJIB KTP
		L	P	L+P	
1	TAMAN SARI	8.433	8.722	17.155	13.521
2	KRUKUT	11.859	11.728	23.587	17.954
3	MAPHAR	9.806	9.788	19.594	15.370
4	TANGKI	7.742	8.029	15.771	12.440
5	MANGGA BESAR	4.417	4.567	8.984	7.201
6	KEAGUNGAN	10.782	10.502	21.284	16.197
7	GLODOK	4.344	4.631	8.975	7.456
8	PINANGSIA	6.578	6.328	12.906	10.015
	KEC. TAMAN SARI	63.961	64.295	128.256	100.154

Sumber: Seksi Data Informasi Dan Pengawasan Suku Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat

d. Kecamatan Tambora

Kecamatan Tambora terdiri dari 11 Kelurahan berdasarkan hasil data konsolidasi Kementerian Dalam Negeri sampai dengan Semester 2 Tahun 2021 adalah sebanyak 270.158 jiwa yang terdiri dari 137.098 jiwa laki-laki dan 133.060 jiwa perempuan, adapun rinciannya dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Kecamatan Tambora Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester 2 Tahun 2021

NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH WAJIB KTP
		L	P	L+P	
1	TAMBORA	6.182	6.200	12.382	9.520
2	KALI ANYAR	15.230	14.392	29.622	22.024
3	DURI UTARA	12.229	11.882	24.111	18.287
4	TANAH SEREAL	16.050	16.068	32.118	24.596
5	KERENDANG	12.781	12.040	24.821	18.566

NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH WAJIB
6	JEMBATAN BESI	18.812	17.704	36.516	27.217
7	ANGKE	18.076	17.435	35.511	27.113
8	JEMBATAN LIMA	13.123	12.601	25.724	19.492
9	PEKOJAN	14.126	14.103	28.229	22.047
10	ROA MALAKA	1.922	1.979	3.901	3.259
11	DURI SELATAN	8.567	8.656	17.223	13.293
	KEC. TAMBORA	137.098	133.060	270.158	205.414

Sumber: Seksi Data Informasi Dan Pengawasan Suku Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat

e. Kecamatan Kebon Jeruk

Kecamatan Kebon Jeruk terdiri dari 7 Kelurahan berdasarkan hasil data konsolidasi Kementerian Dalam Negeri sampai dengan Semester 2 Tahun 2021 adalah sebanyak 365.642 jiwa yang terdiri dari 183.057 jiwa laki-laki dan 182.585 jiwa perempuan, adapun rinciannya dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Kecamatan Kebon Jeruk Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester 2 Tahun 2021

NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH WAJIB KTP
		L	P	L+P	
1	KEBON JERUK	34.166	34.075	68.241	50.215
2	SUKABUMI UTARA	24.486	24.520	49.006	35.543
3	SUKABUMI SELATAN	24.109	23.552	47.661	34.494
4	KELAPA DUA	14.778	14.815	29.593	21.980
5	DURI KEPA	36.883	37.337	74.220	56.225
6	KEDOYA UTARA	28.477	28.246	56.723	42.793
7	KEDOYA SELATAN	20.158	20.040	40.198	29.997
	KEC. KEBON JERUK	183.057	182.585	365.642	271.247

Sumber: Seksi Data Informasi Dan Pengawasan Suku Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat

f. Kecamatan Kalideres

Kecamatan Kalideres terdiri dari 5 Kelurahan berdasarkan hasil data konsolidasi Kementerian Dalam Negeri sampai dengan Semester 2 Tahun 2021 adalah sebanyak 457.362 jiwa yang terdiri dari 231.245

jiwa laki-laki dan 226.117 jiwa perempuan, adapun rinciannya dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Kecamatan Kalideres Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester 2 Tahun 2021

NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH WAJIB KTP
		L	P	L+P	
1	KALIDERES	46.495	45.334	91.829	67.507
2	SEMANAN	46.921	45.019	91.940	65.806
3	TEGAL ALUR	54.069	53.267	107.336	77.436
4	KAMAL	35.787	34.633	70.420	49.890
5	PEGADUNGAN	47.973	47.864	95.837	70.648
	KEC. KALIDERES	231.245	226.117	457.362	331.287

Sumber: Seksi Data Informasi Dan Pengawasan Suku Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat

g. Kecamatan Palmerah

Kecamatan Palmerah terdiri dari 6 Kelurahan berdasarkan hasil data konsolidasi Kementerian Dalam Negeri sampai dengan Semester 2 Tahun 2021 adalah sebanyak 234.190 jiwa yang terdiri dari 118.237 jiwa laki-laki dan 115.953 jiwa perempuan, adapun rinciannya dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.9. Jumlah Penduduk Kecamatan Palmerah Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester 2 Tahun 2021

NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH WAJIB KTP
		L	P	L+P	
1	PALMERAH	39.704	38.897	78.601	58.456
2	SLIPI	10.431	10.123	20.554	15.416
3	KOTA BAMBU UTARA	16.074	15.818	31.892	23.107
4	JATI PULO	18.139	17.752	35.891	26.543
5	KEMANGGISAN	19.768	19.687	39.455	29.933
6	KOTA BAMBU SELATAN	14.121	13.676	27.797	20.236
	KEC. PALMERAH	118.237	115.953	234.190	173.691

Sumber: Seksi Data Informasi Dan Pengawasan Suku Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat

h. Kecamatan Kembangan

Kecamatan Kembangan terdiri dari 6 Kelurahan berdasarkan hasil data konsolidasi Kementerian Dalam Negeri sampai dengan Semester 2 Tahun 2021 adalah sebanyak 309.141 jiwa yang terdiri dari 154.901 jiwa laki-laki dan 154.240 jiwa perempuan, adapun rinciannya dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.10. Jumlah Penduduk Kecamatan Kembangan Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester 2 Tahun 2021

NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH WAJIB KTP
		L	P	L+P	
1	KEMBANGAN UTARA	34.862	34.255	69.117	50.435
2	MERUYA UTARA	27.750	27.573	55.323	41.105
3	MERUYA SELATAN	20.670	20.613	41.283	30.057
4	SRENGSENG	28.914	28.856	57.770	42.302
5	JOGLO	25.873	25.979	51.852	37.941
6	KEMBANGAN SELATAN	16.832	16.964	33.796	25.471
	KEC. KEMBANGAN	154.901	154.240	309.141	227.311

Sumber: Seksi Data Informasi Dan Pengawasan Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat

2.2.4. Aset Yang Dimiliki

Terdapat aset berupa sarana dan prasarana yang Kota Administrasi Jakarta Barat. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi peralatan komputer/telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Barat adalah :

**Tabel 2.11. Data Aset Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
Tahun 2022**

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang/Luas	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak	
1.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	12518	√		
2.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	46870	√		
3.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan	515	√		
4.	Masjid Assahara	2139	√		
5.	Gedung Blok A	10495	√		
6.	Gedung Parkir Blok C 1	8005	√		
7.	Selasar Gedung Blok A dengan Blok C Kantor Walikota	40	√		
8.	Rumah Dinas Walikota Jakarta Barat	1200	√		
9.	Gedung Blok B	19842	√		
10.	Selasar Penghubung Dari Blok A ke Blok B	200	√		
11.	Revitalisasi Ruang Eks PKK	40	√		
12.	Kendaraan Roda 4				
	Sedan	4	√		
	Minibus	6	√		
	Pic Up	2	√		
	Dobel Kabin	3	√		
13.	Kendaraan Roda 3				
	Gerobak Motor	2	√		

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang/Luas	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak	
14.	Kendaraan Roda 2				
	Sepeda Motor	1	√		
15.	Komputer/PC/Laptop				
	Komputer/PC	14	10	4	
	Laptop	35	29	6	

Sumber: Bagian Umum Setko Kota Administrasi Jakarta Barat

2.2.5. Kondisi Ketentraman dan Ketertiban

Meninjau dari kondisi dimasa pandemi COVID-19, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan penindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada Tahun 2020 dilakukan tindakan terdapat 323 teguran tertulis Perorangan, 116 teguran tertulis pada kategori rumah makan, 13 teguran tertulis pada perkantoran dan 823 teguran tertulis pada jenis usaha lainnya.

Adapun penindakan berupa denda administratif perorangan sebanyak 8686 denda dengan jumlah Rp.1.217.700.000. Untuk denda administratif dengan kategori rumah makan sebanyak 46 denda dengan jumlah Rp.157.700.000. Untuk denda administratif perkantoran sebanyak 21 denda dengan jumlah Rp.117.000.000. Dan denda administratif dengan kategori usaha lainnya sebanyak 94 denda dengan jumlah Rp.311.900.000.

Adapun tindakan penyegelan terhadap pelaku pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar sebanyak 99 tindakan, terdiri dari 9 tindakan penyegelan dengan kategori rumah makan, 4 tindakan penyegelan perkantoran, 86 tindakan penyegelan kategori usaha lainnya.

Berikut rincian tindakan kepada pelaku pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar yang terjadi di Kota Administrasi Jakarta Barat:

Tabel 2.12. Data Penindakan PSBB Tahun 2020

NO	PELAKSANA	PERORANGAN (MASKER)			WARUNG MAKAN, RUMAH MAKAN, KAFE/RESTORAN			PERKANTORAN				USAHA LAINNYA		
		TEGURAN TERTULIS	DENDA ADMINISTRATIF	JUMLAH DENDA	SEGEL	DENDA ADMINISTRATIF	JUMLAH DENDA	SEGEL	TEGURAN TERTULIS	DENDA ADMINISTRATIF	JUMLAH DENDA	SEGEL	DENDA ADMINISTRATIF	JUMLAH DENDA
17	KOTA JAKARTA BARAT	221	926	137.450.000	6	25	96.000.000	4	10	10	79.500.000	75	58	223.000.000,00
18	CENGKARENG	16	1149	147.500.000	1	4	12.500.000	0	0	11	37.500.000	2	9	18.500.000,00
19	GROGOL PETAMBURAN	0	464	109.700.000	0	0	-	0	0	0	-	0	1	3.500.000,00
20	TAMBORA	12	1633	205.300.000	0	2	6.000.000	0	0	0	-	5	13	34.000.000,00
21	KEBON JERUK	7	840	124.050.000	0	6	7.200.000	0	1	0	-	1	9	7.900.000,00
22	PALMERAH	36	657	79.450.000	0	0	-	0	1	0	-	1	0	-
23	KALIDERES	6	1682	206.050.000	1	3	12.000.000	0	0	0	-	1	1	5.000.000,00
24	KEMBANGAN	18	635	52.850.000	1	4	9.000.000	0	0	0	-	1	2	10.000.000,00
25	TAMANSARI	7	700	155.350.000	0	2	15.000.000	0	1	0	-	0	1	10.000.000,00
TOTAL		323	8686	1.217.700.000	9	46	157.700.000	4	13	21	117.000.000	86	94	311.900.000,00

Berbeda dengan tahun 2020, pada tahun 2021 berubah kebijakan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Adapun pada Tahun 2021 dilakukan tindakan terdapat 116.428 kerja sosial pelaku perorangan, 598 teguran tertulis pada perkantoran dan 343 pembubaran pada kategori rumah makan.

Adapun penindakan berupa denda administratif perorangan sebanyak 7237 denda dengan jumlah Rp. 851.500.000. Untuk denda administratif dengan kategori rumah makan sebanyak 26 denda dengan jumlah Rp. 26.000.000. Untuk denda administratif perkantoran sebanyak 9 denda dengan jumlah Rp.21.000.000. Dan denda administratif dengan kategori usaha lainnya sebanyak 36 denda dengan jumlah Rp.69.000.000.

Adapun tindakan penyegelan terhadap pelaku pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat diantaranya 343 tindakan Pembubaran pada kategori rumah makan, 24 penutupan sementara selama 3x24 jam pada perkantoran, 65 penutupan sementara selama 3x24 jam pada kategori usaha lainnya.

Berikut rincian tindakan kepada pelaku pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang terjadi di Kota Administrasi Jakarta Barat:

Tabel 2.13. Data Penindakan PPKM Tahun 2021

NO	PELAKSANA	PERORANGAN (MASKER)			WARUNG MAKAN, RUMAH MAKAN, KAFE/RESTORAN			PERKANTORAN				USAHA LAINNYA		
		KERJA SOSIAL	DENDA ADMINISTRATIF	JUMLAH DENDA	Pembubaran	DENDA ADMINISTRATIF	JUMLAH DENDA	Penutupan 3x24 Jam	TEGURAN TERTULIS	DENDA ADMINISTRATIF	JUMLAH DENDA	Penutupan 3x24 Jam	DENDA ADMINISTRATIF	JUMLAH DENDA
17	KOTA JAKARTA BARAT	8365	420	73.250.000	31	4	4.000.000	24	598	1	1.000.000	65	13	34.000.000
18	CENGKARENG	17919	926	98.100.000	0	5	5.000.000	1	137	6	10.000.000	13	14	20.000.000
19	GROGOL PETAMBURAN	9988	1107	141.960.000	25	5	6.000.000	2	146	2	10.000.000	13	1	5.000.000
20	TAMBORA	21473	1190	112.940.000	0	0	-	0	1	0	-	8	0	-
21	KEBON JERUK	10393	86	20.600.000	87	6	6.000.000	2	143	0	-	44	3	5.500.000
22	PALMERAH	8072	294	30.050.000	0	1	1.000.000	0	29	0	-	17	0	-
23	KALIDERES	9618	2350	255.950.000	0	5	4.000.000	0	174	0	-	1	5	4.500.000
24	KEMBANGAN	10328	120	15.150.000	45	0	-	1	82	0	-	2	0	-
25	TAMANSARI	20272	744	103.500.000	155	0	-	0	50	0	-	27	0	-
TOTAL		116428	7237	851.500.000	343	26	26.000.000	30	1360	9	21.000.000	190	36	69.000.000

2.2.6. Kondisi Perekonomian

1) Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

PDRB Perkapita pada Kota administrasi Jakarta Barat meningkat setiap tahunnya sejak tahun 2017 sampai tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat. Pada tahun 2017, PDRB per Kapita Kota Administrasi Jakarta Barat atas dasar harga konstan sebesar Rp 111,377 Juta meningkat menjadi Rp 134,267 juta pada tahun 2021. Namun demikian, terjadi penurunan PDRB per Kapita Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 berupa penurunan daya beli masyarakat maupun aktifitas ekonomi. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan PDRB perkapita Kota Administrasi Jakarta Barat, nilai PDRB per kapita Kota Administrasi Jakarta Barat tidak terjadi penurunan. Hal ini disebabkan karena PDRB pada Kota di Provinsi DKI Jakarta selain Kota Administrasi Jakarta Barat dan Jakarta Selatan mengalami penurunan pada tahun 2020.

Tabel 2.14. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (ribu rupiah), 2017-2021

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	161 683	163 089	156 281	134 479	129 220
Jakarta Selatan	166 718	175 603	186 215	188 635	192 223
Jakarta Timur	972 638	102 376	107 890	98 917	102 687
Jakarta Pusat	434 663	458 755	497 777	427 014	431 410
Jakarta Barat	111 377	117 002	123 115	130 081	134 267
Jakarta Utara	169 413	178 411	183 771	175 782	185 401
DKI Jakarta	157 636	165 768	174 812	170 099	174 962

Catatan/Note: *) Angka Revisi/Revision Number;

**) Angka Sementara/Preliminary Number

Sumber Data Penduduk Pertengahan Tahun untuk penghitungan PDRB per Kapita: / Source of Mid-Year Population Data for calculating GRDP per Capita:

Tahun 2017-2018 menggunakan hasil proyeksi SP2010 / 2017-2018 using the SP2010 projection results

Tahun 2019 menggunakan hasil proyeksi SUPAS2015 / In 2019 using the results of the SUPAS2015 projection

Tahun 2020-2021 menggunakan hasil proyeksi SP2020 Interim / Years 2020-2021 using the SP2020 Interim projection results

Sumber: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain

2) TPT dan TPAK

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kota Administrasi Jakarta Barat meningkat sejak tahun 2019 sampai tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan di Kota Administrasi Jakarta Barat. Meskipun demikian, TPT pada Kota Administrasi Jakarta Barat sudah cukup besar mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Peningkatan TPT ini juga dihasilkan oleh dampak adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyaknya pegawai yang kehilangan pekerjaannya.

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Kota Administrasi Jakarta Barat meningkat sejak tahun 2019 sampai tahun 2021. Meskipun terjadi peningkatan sejak tahun 2019, TPAK mengalami penurunan pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan TPAK tahun 2020.

Berikut rincian data TPT dan TPAK Provinsi DKI Jakarta menurut kota administrasi:

Tabel 2.15. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2019-2021

Kabupaten/ Kota <i>Regency/ Municipality</i>	TPT/UR					TPAK/LFPR				
	2019		2020		2021	2019		2020		2021
	Agt Aug	Feb Feb	Agt Aug	Feb Feb	Agt Aug	Agt Aug	Feb Feb	Agt Aug	Feb Feb	Agt Aug
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kepulauan Seribu	5,89	...	7,37	...	8,58	57,53	...	60,70	...	65,45
Jakarta Selatan	7,19	...	10,79	...	7,33	62,89	...	63,81	...	61,44
Jakarta Timur	6,35	...	9,29	...	8,23	63,74	...	61,98	...	60,85
Jakarta Pusat	7,88	...	10,97	...	7,75	64,42	...	63,73	...	63,17
Jakarta Barat	5,55	...	12,27	...	9,06	62,61	...	64,37	...	63,21
Jakarta Utara	6,72	...	11,79	...	9,84	67,08	...	65,97	...	65,79
DKI Jakarta	6,54	5,15	10,95	8,51	8,50	63,90	66,97	63,81	65,12	62,63

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Februari dan Agustus

2.3 Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat

Salah satu indikator kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat adalah dilihat dari program-program strategis sesuai dengan fungsi koordinasi instansi/unit teknis di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat serta tingkat penyerapan anggaran setiap tahunnya.

Berikut pencapaian kinerja pelayanan dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kota Administrasi Jakarta Barat dari Tahun 2018 – 2022.

Tabel 2.16. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat dari Tahun 2018 – 2022

No.	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	satuan	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,00	83,00	86,00	88,00	88,50	83,76	84,41	86,34	90,67		105%	102%	100%	103%	
2		Skor EKPPD	Skor	3,100	3,150	3,200	3,250	3,300	3,1712	3,1712	3,2374	DBR*		102%	101%	101%	DBR*	
3	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat	indeks kepuasan pelayanan kantor	indeks	4	4	4	4	4	4	4	4	4		100%	100%	100%	100%	
4	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Barat	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	indeks	4	4	4	4	4	4	3	4	4		100%	75%	100%	100%	
5	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	Persentase penanganan perkara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	%	0	100	100	100	100	0	100	100	100			100%	100%	100%	
6	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat	Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan	%	0	20	40	60	80	0	45,41	100	96			100%	100%	160%	
7	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat	Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum	%	0	100	100	100	100	0	100	100	100			100%	100%	100%	
8	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	Nilai	0	94	95	96	97	0	84,03	98,14	-			89%	100%	0%	

No.	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	satuan	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat	Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip)	%	0	100	100	100	100	0	100	100	100			100%	100%	100%	
10	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat	Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai	%	0	100	100	100	100	0	73,4	100	100			73%	100%	100%	
11	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat	Jumlah Kawasan yang tertata	Kawasan	0	1	1	1	1	0	0	0	0			0%	0%	0%	
12	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	indeks	0	4	4	4	4	0	3,84	4	4			96%	100%	100%	
13	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat	Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat	%	0	100	100	100	100	0	100	100	100			100%	100%	100%	
14	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota	%	0	100	100	100	100	0	100	100	100			100%	100%	100%	
15	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat	Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak	%	0	100	100	100	100	0	100	100	100			100%	100%	100%	
16	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat	Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS	%	0	100	100	100	100	0	100	100	100			100%	100%	100%	

No.	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	satuan	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat	Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta	%	0	85	86	87	88	0	100	100	94,11			100%	100%	108%	
18	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	%	0	90	91	92	93	100	91,19	95,53	99,15		100%	100%	100%	108%	
19	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	0	90	91	92	93	100	94,61	99,25	100		100%	100%	100%	109%	
20	Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota Administrasi	%	100	0	0	0	0	95	0	0	0		95%				
21	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	%	100	0	0	0	0	97,00	0	0	0		97%				
22	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota/Kabupaten Administrasi	indeks	0	4	4	4	4	0	3	3	0			75%	75%	0%	

No.	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	satuan	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
23	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	gedung	0	53	64	72	76	0	53	53	53			100%	83%	74%	
24	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Jumlah Kantor Camat/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	gedung	0	6	11	11	11	0	6	6	6			100%	55%	55%	

*DBR = Data Belum Rilis

**Tabel 2.17. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat
dari Tahun 2018 – 2022**

No.	Program	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat	78.064.088.253	128.863.632.786	122.346.087.719			61.031.192.762	90.047.340.571	44.055.864.147			78%	70%	36%		
2	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Barat	4.546.769.679	10.329.713.940	13.350.618.201			2.806.558.564	5.445.065.904	3.390.808.877	-		62%	53%	25%		
3	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat	-	6.052.194.740	6.591.425.160			-	4.370.600.655	1.048.024.000	-		0%	72%	16%		
4	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	-	204.961.727.811	194.975.283.754			1.184.795.541	237.225.794.854	205.116.582.398	-		100%	116%	105%		
5	Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat	79.682.083.525	-	-			75.888.030.957	-	-	-		95%	0%	0%		
6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	520.312.310.046	-	-			502.916.632.747	-	-	-		97%	0%	0%		
7	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Barat	-	442.619.141.613	650.529.884.097			-	351.946.021.184	328.686.009.692	-		0%	80%	51%		
8	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				207.482.230.625	455.784.448.158				203.556.660.428					98%	
9	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI				11.474.925.915	26.210.850.722				6.644.757.464					58%	
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				774.257.155.565	573.226.431.685				359.470.034.712					46%	
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				273.444.107.435	724.513.919.833				265.930.872.308					97%	
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN				75.303.432.751	230.828.976.533				49.031.358.801					65%	
13	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				2.141.148.984	8.333.236.815				1.853.154.818					87%	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat

Penyelenggaraan pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat untuk mendukung kinerja Gubernur faktanya juga menemukan beberapa tantangan. Tantangan dimaksud antara lain juga timbul dari sisi internal maupun eksternal. Untuk tantangan internal, beberapa hal yang dihadapi antara lain:

- 1) Terdapat beberapa pegawai ASN maupun non ASN yang terpapar *Covid-19* sehingga membutuhkan cara kerja pelayanan yang adaptif;
- 2) Kebutuhan pengurusan perkara di pengadilan dan penyelesaian sengketa pertanahan tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat yang perlu dioptimalkan;
- 3) Belum meratanya kesadaran Hukum dan HAM serta belum optimalnya pembinaan Kota Peduli HAM tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- 4) Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- 5) Belum meratanya kesadaran masyarakat dalam pencegahan masalah kesehatan, pemberdayaan kepemudaan, perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk;
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanggulangan Kemiskinan, Kota Sehat dan Kota Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- 7) Belum optimalnya penyusunan rencana kerja anggaran dan penatausahaan keuangan tingkat Kota; dan
- 8) Belum optimalnya koordinasi bidang perbendaharaan di Kota Administrasi Jakarta Barat belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Selain dari tantangan internal dimaksud, beberapa tantangan eksternal yang dihadapi antara lain:

- 1) Pandemi Covid-19 yang akhirnya berpengaruh terhadap cara kerja maupun kinerja pelayanan dari Kota Administrasi Jakarta Barat;

- 2) Terdapat beberapa masyarakat yang belum puas terhadap kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- 3) Belum tersedia sepenuhnya sarana dan prasarana yang memadai khususnya untuk penempatan jaringan utilitas.

Berdasarkan tantangan internal dan eksternal dimaksud, peluang internal yang dimiliki Kota Administrasi Jakarta Barat antara lain:

- 1) Adanya kebijakan pola kerja yang adaptif memanfaatkan teknologi dan informasi agar menjaga pelayanan di era pandemi *Covid-19*;
- 2) Adanya kebijakan pengalokasian anggaran yang semakin besar di tingkat Kota serta pemberian kewenangan untuk mengalokasikan pagu wilayah;
- 3) TKD yang layak berbasis kinerja mendorong ASN bekerja dengan output dan outcome yang terukur;
- 4) Adanya evaluasi dan monitoring terhadap kinerja sebagai dasar penerapan reward dan punishment yang berimbang untuk mendorong terciptanya keadilan dalam pola karir ASN;
- 5) Sebagian lembaga kemasyarakatan telah memperoleh pembiayaan pengembangan dan operasional dari Pemprov DKI Jakarta;
- 6) Telah terbangunnya sistem/kanal online sebagai sarana atau sistem pengukuran kinerja pelayanan dan tindak lanjut pengaduan.

Selanjutnya, untuk peluang eksternal yang dimiliki oleh Kota Administrasi Jakarta Barat antara lain:

- 1) Terdapat aktor-aktor non-pemerintah yang turut serta mendukung pembangunan dan pelayanan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- 2) Peraturan Perundangan yang mendukung pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- 3) Dukungan Pemerintah Provinsi dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; dan
- 4) Peningkatan jumlah wirausaha baru di Kota Administrasi Jakarta Barat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.3.1. Identifikasi Permasalahan Umum di Jakarta Barat

Melihat dari kondisi geografis Kota Administrasi Jakarta Barat sebagian besar terdiri dari tanah daratan yang relatif landai dengan belahan kontur yang tinggi di sepanjang Kali Banjir Kanal, yang memungkinkan pertemuan pasang air laut dengan limpasan banjir permukaan sehingga wilayah ini cukup rawan banjir.

Belum Optimalnya penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanggulangan Kemiskinan. Ditambah dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 Tingkat Kemiskinan dari tahun 2019 sebesar 3,62% meningkat menjadi 4,97% pada Tahun 2020. Meskipun pada tahun 2021 persentase Tingkat Kemiskinan menurun hingga 4,67%, data ini masih tetap lebih besar dari sebelum terjadinya pandemi COVID-19.

Melihat dari demografi Kota Administrasi Jakarta Barat dimana budaya multikultur warga menjadi salah satu faktor dalam menangani permasalahan ketentraman dan ketertiban. Dalam hal ini pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menjaga ketentraman dan ketertiban dengan menegakkan perturan daerah melaui perangkat daerahnya. Apabila dipandang perlu untuk menangani hal tersebut, Polri akan membantu pemerintah daerah untuk menegakkan semua pertauran perundang-undangan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Maka dari itu Pemerintah kota administrasi Jakarta Barat yang berfungsi mengkoordinasikan instansi/unit teknis dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik untuk mencapai visi RPD.

3.3.2. Identifikasi Permasalahan Pelayanan di Jakarta Barat

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Barat tentunya perlu untuk terus ditingkatkan. Terlebih lagi, hal ini mengingat adanya pandemi Covid-19 di Tahun 2020 yang telah mempengaruhi segala sektor pemerintahan, swasta, maupun pola kehidupan bermasyarakat. Memperhatikan capaian kinerja pelayanan di Bab 2 sebelumnya, dapat terlihat bahwa terdapat beberapa kinerja pelayanan yang belum mencapai target di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Merujuk struktur pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, kedudukan Kota Administrasi Jakarta Barat berbeda dengan wilayah kota lainnya di Indonesia yang memiliki asas otonomi daerah tingkat kota/kabupaten sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedudukan Kota Administrasi Jakarta Barat dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merupakan organisasi Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagai urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah. Di sisi lain, Kota Administrasi Jakarta Barat juga berperan untuk mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Hal tersebut faktanya berimplikasi pada terbatasnya kewenangan Walikota beserta perangkatnya yang hanya memiliki fungsi koordinasi, fasilitasi dan administrasi, namun tidak memiliki fungsi teknis dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan lintas urusan yang terus berkembang di wilayahnya. Namun demikian, Kota Administrasi Jakarta Barat berfungsi sebagai lapisan terdepan dalam berinteraksi dengan persoalan-persoalan masyarakat. Sehingga, keterbatasan kewenangan tersebut menjadi akar masalah yang perlu segera diatasi dengan memperbaiki pola koordinasi di dalam konteks pelayanan kepada warga masyarakat di Jakarta Barat. Penjabaran lebih lanjut disampaikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kota Administrasi Jakarta Barat masih di angka 90,62%.	Bagian Tata Pemerintahan: Belum optimalnya kinerja pelayanan Kecamatan dan Kelurahan.	1) Respon time kehadiran camat dan lurah saat terjadinya bencana/masalah sosial/kejadian perlu untuk dipercepat. 2) Pengurus kelembagaan kemasyarakatan belum menyadari dan memahami tugas fungsi lembaganya. 3) Belum optimalnya koordinasi dan monitoring penerimaan daerah di Kota Administrasi Jakarta Barat secara berkelanjutan. 4) Belum optimalnya koordinasi penanggulangan bencana tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat. 5) Perlunya peningkatan kualitas penyampaian informasi kepada masyarakat. 6) Belum optimalnya koordinasi pengendalian pemantauan dan evaluasi kegiatan di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan.
	Bagian Hukum: Belum optimalnya penanganan permasalahan hukum di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	1) Belum optimalnya ketersediaan kebutuhan pengurusan perkara di pengadilan dan penyelesaian sengketa pertanahan tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat belum baik. 2) Belum meratanya kesadaran Hukum dan HAM serta belum optimalnya pembinaan Kota Peduli HAM tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat
	Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik: Belum optimalnya pelayanan kepegawaian, tatalaksana dan	1) Belum optimalnya penyusunan laporan dan evaluasi kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat. 2) Belum tersusunnya SOP di sebagian unit kerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	pelayanan publik.	3) Belum optimalnya koordinasi pengembangan kompetensi pegawai ASN di Kota Administrasi Jakarta Barat. 4) Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat. 5) Belum optimalnya pembinaan administrasi kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat.
	Bagian Perekonomian: Belum optimalnya penyelenggaraan kinerja bidang ekonomi di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	1) Belum tercapainya target pembentukan wirausaha baru di Kota Administrasi Jakarta Barat. 2) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi pemantauan dan evaluasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketahanan Pangan di Kota Administrasi Jakarta. 3) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang perhubungan, perindustrian dan energi di Kota Administrasi Jakarta Barat. 4) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang kepariwisataan, kebudayaan dan ketenagakerjaan di Kota Administrasi Jakarta Barat. 5) Belum tercapainya peningkatan kualitas udara di Jakarta Barat. 6) Perlunya pendekatan wirausaha baru di era Pandemi Covid-19
	Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup: Belum optimalnya penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penataan kota dan lingkungan hidup	1) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pemanfaatan ruang bangunan. 2) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi,

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		pemantauan dan evaluasi penataan kawasan di Kota Administrasi Jakarta Barat. 3) Masih terkendalanya penagihan kewajiban fasos fasum dan sinkronisasi data SIPPT di Kota Administrasi Jakarta Barat. 4) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang lingkungan hidup dan kebersihan di Kota Administrasi Jakarta Barat. 5) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang sarana dan prasarana kota di Kota Administrasi Jakarta Barat.
	Bagian Umum dan Protokol: Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan umum dan keprotokolan	1) Prasarana dan sarana Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat belum cukup memadai. 2) Adanya prasarana dan sarana Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat yang tidak laik pakai. 3) Kurangnya sarana pendukung untuk tata kelola arsip. 4) Belum optimalnya dukungan kegiatan keprotokolan dan pelayanan jamuan tamu di Kota Administrasi Jakarta Barat.
	Bagian Kesra: Belum optimalnya penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesejahteraan rakyat.	1) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanggulangan Kemiskinan, Kota Sehat dan Kota Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Barat. 2) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang sosial, pemuda di Kota Administrasi Jakarta Barat. 3) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		bidang kesehatan, pemberdayaan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk di Kota Administrasi Jakarta Barat.
	Bagian Keuangan: Belum optimalnya penyelenggaraan kinerja bidang Keuangan di Kota Administrasi Jakarta Barat	1) Belum optimalnya penyusunan rencana kerja anggaran dan penatausahaan keuangan tingkat Kota. 2) Belum optimalnya koordinasi bidang perbendaharaan di Kota Administrasi Jakarta Barat belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023-2026

Berdasarkan penjabaran permasalahan, pokok permasalahan dan akar masalah di atas, untuk merumuskan isu strategis dalam penyusunan Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023-2026 maka dalam hal ini perlu memperhatikan visi dan misi serta program rencana pembangunan daerah untuk jangka menengah Provinsi DKI Jakarta. Namun, pada konteks perumusan saat ini, faktanya terdapat sedikit perbedaan untuk konteks visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.

Pada kondisi normal, visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tentunya mempedomani visi dan misi dari Kepala Daerah atau Gubernur terpilih berdasarkan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Akan tetapi, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam rangka menyambut Pilkada Serentak Tahun 2024, maka perumusan visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah akan mempedomani dokumen RPJPD Provinsi DKI Jakarta.

Mengacu pada Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, di Provinsi DKI Jakarta, telah ditetapkan bahwa ‘Visi’ pembangunan jangka panjang daerah Provinsi DKI Jakarta adalah ***“Ibukota Negara Kesatuan Republik***

Indonesia Yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”.

Sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen RPJPD 2002-2025, Visi DKI Jakarta telah disusun dengan memperhatikan kondisi objektif, potensi, permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Provinsi DKI Jakarta serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, uraian pemahaman terkait dengan visi dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 29 tahun 2007 adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia juga memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.
- 2) Jakarta yang aman bermakna terciptanya kehidupan yang tertib, tentram, damai dan mampu mengatasi ancaman bencana alam, cuaca ekstrem dan perubahan iklim.
- 3) Jakarta yang nyaman bermakna terciptanya ruang kehidupan yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia.
- 4) Jakarta yang sejahtera bermakna terwujudnya kondisi kehidupan manusia yang lebih baik dimana masyarakatnya dalam keadaan makmur, sehat, damai dan memiliki keseimbangan lahir dan batin.
- 5) Jakarta yang produktif bermakna bahwa pembangunan yang dilakukan memberikan hasil dan manfaat serta nilai tambah yang secara ekonomi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing kota.
- 6) Jakarta yang berkelanjutan bermakna terwujudnya proses pembangunan yang dilakukan secara terencana dengan tetap

memperhatikan keutuhan, kelestarian, keasrian dan keseimbangan lingkungan hidup untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan kehidupan generasi masa kini dan generasi masa depan.

- 7) Jakarta yang berdaya saing global bermakna terbangunnya kemampuan dan kapasitas daerah yang mampu bersaing dalam peningkatan standar kehidupan warganya, pengembangan aktivitas ekonomi dan penyediaan pelayanan yang luas dan berkualitas.

Untuk mencapai visi dimaksud, telah juga terdapat 6 misi yang terdiri dari:

- 1) Meningkatkan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana wilayah
Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana wilayah yang maju dan memadai dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing global, memperluas keterhubungan antar wilayah dan mendukung pemenuhan kebutuhan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Dalam upaya melaksanakan misi ini, pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana wilayah difokuskan pada: prasarana dan sarana transportasi, drainase perkotaan, persampahan, pengolahan limbah, sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan, air bersih, perumahan, permukiman, telematika dan sarana sosial dan ekonomi.
- 2) Meningkatkan perekonomian yang kuat dan berkualitas
Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas adalah mengembangkan, membangun dan memperkuat sektor perekonomian daerah, termasuk sektor keuangan yang handal, maju, dan berdaya saing global dan meningkatkan perbaikan iklim investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya melaksanakan misi ini, pengembangan dan penguatan perekonomian difokuskan pada: struktur ekonomi yang berbasis jasa, perdagangan, pariwisata dan industri kreatif, kualitas ketenagakerjaan, perijinan usaha yang efektif dan efisien, laju inflasi

yang terkendali dan pemerataan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

3) Membangun ketahanan sosial dan budaya

Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya adalah meningkatkan, membangun dan mengembangkan kemampuan dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur sesuai dengan nilai budaya dan kearifan lokal serta mewujudkan masyarakat Jakarta yang beriman, bertakwa, berkualitas, maju dan sejahtera. Dalam upaya melaksanakan misi ini, peningkatan dan pengembangan ketahanan sosial budaya difokuskan pada: perwujudan kesejahteraan sosial masyarakat, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan perempuan dan anak, pembangunan manusia berakhlak mulia, peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, pengelolaan kependudukan dan harmonisasi budaya multikultur, serta penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.

4) Meningkatkan daya dukung, daya tampung lingkungan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam

Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah menjamin dan menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan manusia dengan memperhatikan kepentingan kehidupan generasi mendatang. Dalam upaya melaksanakan misi ini, pelestarian lingkungan hidup difokuskan pada: pengendalian pemanfaatan penataan ruang yang berkualitas, penyediaan ruang terbuka hijau, penanganan banjir, kebakaran dan bencana lainnya serta peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, pengurangan emisi karbon, kesiapsiagaan menghadapi bencana, pencegahan atas penurunan muka air tanah, pengendalian pencemaran lingkungan air udara dan tanah serta pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

5) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pemerintahan

Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas aparat dan lembaga pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam upaya melaksanakan misi ini, peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintahan difokuskan pada: penataan kewenangan, reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan, peningkatan tata laksana dan manajemen pemerintahan, pengelolaan pembiayaan pembangunan, pembinaan dan pengawasan, serta kerjasama antar daerah dan kerjasama internasional.

6) Memperkuat inovasi dan kreativitas daerah

Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat Jakarta dalam membangun institusi/tatalaksana dalam menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah sosial, budaya dan ekonomi menjadi lebih tinggi dengan tujuan mendukung kinerja Kota Jakarta. Dalam upaya melaksanakan pengembangan kemampuan daerah yang visioner dan berkualitas dalam penguatan inovasi dan kreasi daerah difokuskan pada: i) pengembangan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lembaga penelitian dan pengembangan, dunia usaha, dan masyarakat, ii) pengembangan ekonomi kreatif, kluster unggulan daerah dan kewirausahaan berbasis teknologi, iii) penguatan regulasi dan kebijakan pro inovasi dan kreasi, iv) penguatan kapasitas dan kualitas pelaku industri kreatif, v) penguatan iklim usaha yang konstruktif dan kondusif dan perwujudan institusi pengembangan inovasi, dan vi) penyediaan sarana kota yang berkelanjutan.

Memasuki periode ke-5 dalam RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025, fokus pembangunan Provinsi DKI Jakarta adalah, ***“Mencapai Kota Jakarta yang Berdaya Saing Global Berlandaskan Kapasitas Sarana dan Prasarana Yang Memadai, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan***

Berkelanjutan Serta Kapasitas Inovasi Daerah yang Terus Meningkat.”

Berdasarkan visi dan misi serta tema pembangunan dimaksud, berikut merupakan uraian faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah dalam mencapai misi pembangunan.

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pencapaian Misi Pembangunan 2023-2026

Misi	Penghambat	Pendorong
Meningkatkan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana wilayah	Belum optimalnya koordinasi pengelolaan sarana dan prasarana wilayah khususnya penempatan jaringan utilitas	Tersedianya beberapa aktor kolaborasi yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan kualitas sarana dan prasarana wilayah
Meningkatkan perekonomian yang kuat dan berkualitas	Masyarakat saat ini dihadapi oleh adanya faktor eksternal seperti Pandemi Covid-19, sehingga perekonomian Provinsi DKI Jakarta maupun seluruh masyarakat cenderung menurun	Angka kasus Covid-19 cenderung menurun, dan telah dilakukan koordinasi untuk menciptakan sumber perekonomian baru dengan mengadaptasi adanya perubahan-perubahan yang ada pasca pandemi Covid-19.
Membangun ketahanan sosial dan budaya	Perekonomian masyarakat yang baru akan bangkit pasca pandemi Covid-19 cenderung masih rentan dan mempengaruhi ketahanan sosial dan budaya	Terdapat beberapa aktor eksternal terkait yang ingin berkolaborasi untuk memulihkan ekonomi masyarakat, ketahanan sosial dan budaya pasca pandemi Covid-19
	Belum meratanya kesadaran masyarakat dalam pencegahan masalah kesehatan, pemberdayaan kepemudaan, perlindungan anak	Adanya forum pertemuan lintas sektor/ lintas program dan program pembangunan kesadaran masyarakat dalam pencegahan masalah kesehatan, pemberdayaan

Misi	Penghambat	Pendorong
	dan Pengendalian Penduduk	kepemudaan, perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk yang dilaksanakan bersama UKPD terkait.
Meningkatkan daya dukung, daya tampung lingkungan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan di Kota Administrasi Jakarta Barat.	1) Adanya regulasi dalam penataan ruang parkir bagi bangunan 2) Adanya regulasi tentang pengaturan ketertiban umum dan personil penegak aturan. 3) Terprogramnya kegiatan pembentukan wirausaha baru, pembinaan pedagang mikro dan penempatan pada lokasi binaan
Meningkatkan kapasitas dan kualitas pemerintahan	Belum optimalnya pola koordinasi perangkat daerah yang secara operasional bertanggungjawab kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.	Telah diterbitkan beberapa aturan yang berkaitan dengan pola hubungan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	Masyarakat belum puas terhadap kinerja pelayan Kota Administrasi Jakarta Barat.	Telah terbangunnya sistem/kanal online sebagai sarana atau sistem pengukuran kinerja pelayanan dan tindak lanjut pengaduan
	Belum terbentuknya karakter aparatur sipil negara yang disiplin, berintegritas dan profesionalisme pada sebagian Pegawai.	Diterapkannya merit system dalam pola pembinaan kepegawaian mendorong perbaikan karakter ASN
Memperkuat inovasi dan kreativitas daerah	Belum optimalnya terobosan inovasi-inovasi dari para ASN di Kota Administrasi Jakarta Barat	TKD yang layak berbasis kinerja mendorong ASN bekerja dengan inovatif dan output serta outcome yang terukur

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Mempedomani Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, tentunya dalam penyusunan Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat 2023-2026 perlu untuk memperhatikan koridor-koridor pengaturan kewilayahan yang telah ditetapkan. Beberapa koridor pengaturan dimaksud antara lain:

- 1) Terwujudnya pemanfaatan kawasan budi daya secara optimal dalam rangka memenuhi kebutuhan 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) jiwa penduduk yang persebarannya diarahkan sebanyak 25,3% di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- 2) Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan kawasan rawan penurunan tanah yang meliputi Cengkareng Barat, Meruya, Kebun Jeruk dan Daan Mogot;
- 3) Pusat kegiatan tersier di Kota Administrasi Jakarta Barat meliputi:
 - a. Kantor Walikota Jakarta Barat sebagai pusat pemerintahan;
 - b. Kawasan Lokasari - Mangga Besar sebagai pusat perdagangan dan jasa;
 - c. Kawasan Rawa Belong sebagai pusat perdagangan tanaman hias;
 - d. Kawasan Asem Reges sebagai pusat perdagangan dan jasa;
 - e. Kawasan Pasar Cengkareng sebagai pusat perdagangan dan jasa; dan
 - f. Kawasan Tanjung Duren sebagai pusat perdagangan dan jasa.
- 4) Perlunya pembangunan dan peningkatan jalan di perbatasan Kota, serta jalan tembus dan jalan sejajar; penataan hierarki jalan dan penataan moda angkutan umum sesuai dengan hierarki jalan berikut fasilitas penunjang; pembangunan jaringan jalan lokal yang berfungsi sebagai jalan tembus dan jalan sejajar; penataan parkir di badan jalan pada kawasan yang rawan kemacetan lalu lintas serta penyediaan fasilitas parkir di luar badan jalan berupa gedung parkir di Kawasan

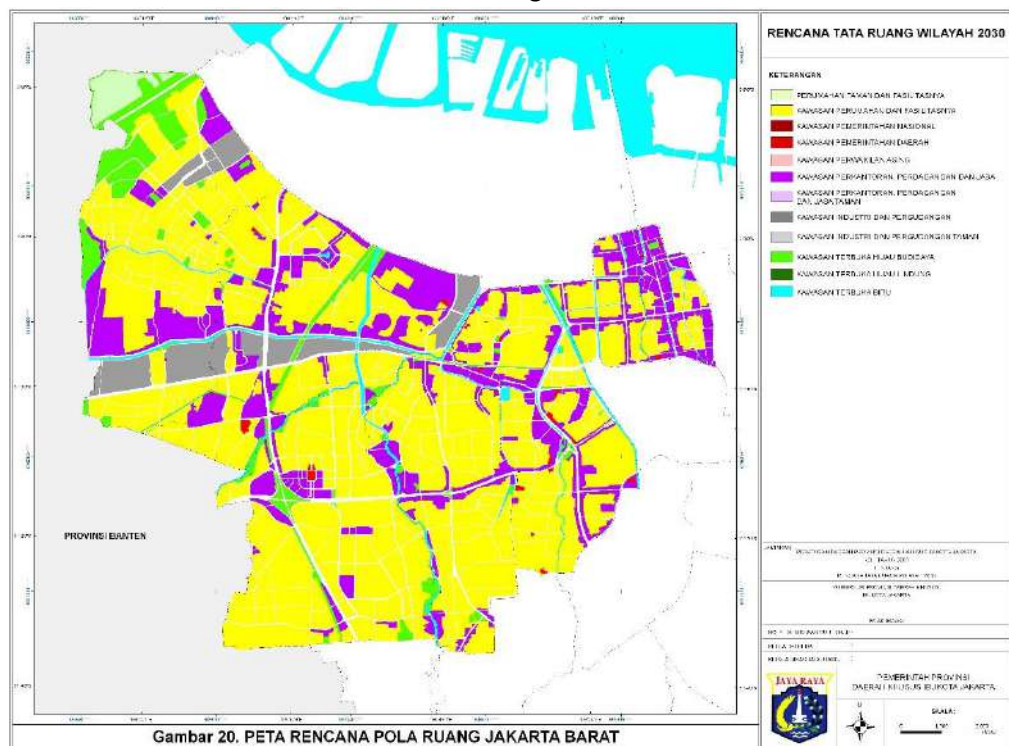
Glodok – Pancoran, Jalan Gajah Mada dan di kawasan lain yang padat parkir; pembangunan dan peningkatan fasilitas pejalan kaki di Kawasan Kota Tua, Sentra Primer Barat dan tempat strategis lain serta kawasan yang mendukung pelayanan angkutan umum; pembangunan dan peningkatan terminal/stasiun terpadu untuk menunjang pergerakan antar moda angkutan umum di Sentra Primer Barat dan Kalideres; pembangun gedung dan/atau taman parkir sebagai fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride) di Kembangan, Rawa Buaya dan Kalideres; dan peningkatan manajemen lalu lintas dan penyediaan kelengkapan sarana lalu lintas pada kawasan yang padat lalu lintas di Taman Sari dan Tambora.

- 5) Terdapat rencana pengembangan prasarana sumber daya air di Kota Administrasi Jakarta Barat yang dilaksanakan melalui, pengembangan sistem prasarana air bersih melalui perluasan jaringan perpipaan pada tiap kecamatan; pemanfaatan waduk/situ sebagai penampungan air; dan perluasan kawasan resapan air melalui penambahan RTH.
- 6) Terdapat rencana pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air di Kota Administrasi Jakarta Barat yang dilaksanakan berdasarkan arahan, pengembangan prasarana pengendalian banjir dan drainase di kawasan barat dengan cara peningkatan kapasitas Kanal Banjir, Cengkareng Drain, dan pembangunan Cengkareng Drain II (sodetan Kali Angke-Mookervart-laut); pembangunan dan peningkatan kapasitas saluran untuk mengatasi genangan air di kawasan Palmerah, Jelambar, Pekojan, Sentra Primer Barat, Kapuk, Kamal, Tegal Alur, Kedaung Kali Angke, Kalideres dan Rawa Buaya; normalisasi sungai dan saluran Kali Mookervart, Kali Pesanggrahan, Kali Angke, Kali Sepak, Kali Jelangkeng, Kali Bandengan, Kali Duri, Kali Beton, Kali Tamansari, Kali Citegal Alur, Kali Maja, Kali Sekretaris, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, Cengkareng Drain dan Kali Grogol; pembangunan dan peningkatan kapasitas polder dan pemompaan Pinangsia, Tomang, Bojong, Srengseng, Grogol, Gang Macan, Jelambar Wijaya Kusuma, Rawa Kepa dan Slipi Hankam, Kyai Tapa, Kapuk,

Pedongkelan Semanan, Pondok Bandung, Mangga Raya, Kedoya dan Cengkareng serta di lokasi yang rawan genangan; dan pengendalian pengambilan air tanah untuk menghindarkan gejala penurunan tanah (land subsidence) yang berpotensi menimbulkan genangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berikut gambar pola ruang dan struktur pola ruang Kota Administrasi Jakarta Barat dalam Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

Gambar 3.1. Peta Rencana Pola Ruang Kota Administrasi Jakarta Barat



Sumber: Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030

3.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Untuk mengungkit IKLH dimaksud, tentunya perlu untuk juga ditingkatkan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Hutan (IKTH). Pada tahun 2020, angka IKA Provinsi DKI Jakarta berada di angka 41,19%. Sedangkan untuk IKU berada di angka 66,69%, dan IKTH berada di angka 25,99%. Walaupun dalam kurun waktu 8 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, namun

tentunya masing-masing indeks dimaksud masih butuh peningkatan yang signifikan agar semakin mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jakarta Barat.

Memperhatikan dokumen KLHS DKI Jakarta, isu yang perlu diperhatikan salah satunya adalah berkaitan dengan daya dukung air. Berdasarkan Status Indikatif DDLH Penyedia Air Wilayah Daratan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, telah disebutkan bahwa 98% wilayah DKI Jakarta diindikasikan telah melampaui daya dukung air. Status indikatif terlampaui menunjukkan bahwa kemampuan fungsi lingkungan DKI Jakarta dalam menyediakan air permukaan belum mampu memenuhi kebutuhan air baik untuk kegiatan domestik dan lahan di provinsi tersebut. Jumlah ketersediaan air jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan air DKI Jakarta. Oleh karena itu, himbauan terkait dengan penggunaan air yang efisien serta penerapan teknologi-teknologi baru yang diimbangi dengan strategi penurunan penggunaan air yang tepat sangat dibutuhkan dalam pembangunan di DKI Jakarta.

Selanjutnya, selain daya dukung air, di Kota Administrasi Jakarta Barat perlu juga untuk melakukan koordinasi yang efektif terkait dengan pengelolaan sampah. Hal ini dikarenakan, berdasarkan KLHS Tahun 2020, perkiraan timbunan sampah di Kota Jakarta Barat menempati posisi kedua dengan perkiraan timbunan sampah 681 ton per tahun. Oleh karena itu, Kota Administrasi Jakarta Barat perlu melakukan berbagai upaya koordinasi untuk menangani permasalahan pengelolaan persampahan, terutama untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang. Hal ini dipicu oleh faktor keterbatasan sediaan lahan untuk sanitary landfill di dalam wilayah DKI Jakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena itu pembangunan jangka menengah di Kota Administrasi Jakarta Barat tentunya selain dari memperhatikan peningkatan perekonomian, perlu juga untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Sehingga, kedepannya diharapkan perekonomian yang berkelanjutan dapat terwujud di Kota Jakarta Barat. Oleh karena itu, koordinasi yang optimal, efektif dan efisien

dalam mendukung perekonomian yang berkelanjutan dimaksud menjadi suatu urgensi yang perlu dilakukan di Kota Administrasi Jakarta Barat.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis pembangunan DKI Jakarta tahun 2023-2026 merupakan aspek dalam penentuan kebijakan umum pembangunan jangka menengah berdasarkan permasalahan pembangunan. Isu-isu strategis Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 sebagaimana telah tertuang di dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 telah disusun dengan berdasarkan pertimbangan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) permasalahan strategis berdasarkan hasil analisa kinerja pemerintahan;
- 2) prioritas dan arah pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025;
- 3) kebijakan dalam RTRW 2030;
- 4) Agenda Pembangunan, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Major Projects dalam RPJMN 2020-2024;
- 5) Kebijakan dalam RPD Prov/Kab/Kota penyangga;
- 6) hasil evaluasi capaian SDGs, serta;
- 7) Isu-isu aktual diantaranya pandemi COVID-19 dan Undang-Undang Ibukota Negara.

Berdasarkan pertimbangan beberapa hal diatas, telah terumuskan sejumlah 6 (enam) isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 yang diantaranya:

- 1) Ketahanan Terhadap Bencana
- 2) Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik
- 3) Ketahanan Ekonomi Inklusif
- 4) Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas
- 5) Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara
- 6) Pemerataan Pembangunan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kota Administrasi Jakarta Barat, telaahan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan dokumen perencanaan pembangunan nasional serta rencana tata ruang, telah dirumuskan beberapa isu-isu strategis yang berkaitan dengan Kota Administrasi Jakarta Barat. Rumusan isu-isu strategis dimaksud antara lain:

1) Isu partisipasi masyarakat

Untuk menjaga dan memelihara kebersihan lingkungannya serta tanggap bencana, masyarakat harus diajak berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan maupun yang berkaitan kebencanaan.

2) Isu ekonomi masyarakat

Selama dan pasca pandemi *Covid-19*, dampak melemahnya perekonomian telah dihadapi oleh seluruh elemen baik masyarakat maupun swasta. Oleh karena itu, dalam hal ini masih perlu diperluas peluang usaha dan kesempatan untuk bekerja serta bimbingan usaha masyarakat. Di sisi lain, transformasi ekonomi dengan pendekatan kolaborasi dan adaptif terhadap teknologi informasi serta pola hidup baru pasca pandemi *Covid-19* perlu ditingkatkan.

3) Isu pemberdayaan masyarakat di bidang kepariwisataan, kebudayaan dan olahraga

Untuk peningkatan perekonomian di Kota Administrasi Jakarta Barat, hal tersebut dapat dilakukan di antaranya melalui pendekatan pariwisata, kebudayaan dan olahraga. Akan tetapi, untuk memaksimalkan pendapatan tersebut berimplikasi kepada seluruh elemen masyarakat, maka partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan kepariwisataan budaya dan olahraga perlu ditingkatkan.

4) Isu pola koordinasi Perangkat Daerah dan Aktor-Aktor Pembangunan

Sebagai Kota Kolaborasi, pola koordinasi yang efektif dan efisien sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota

Administrasi Jakarta Barat. Pada kondisinya saat ini, pola koordinasi tersebut cenderung masih menemukan beberapa kendala seperti kurang tanggapnya respon dari masing-masing aktor. Oleh karena itu, kedepannya, strategi-strategi kolaborasi yang cepat dan tepat perlu untuk ditingkatkan baik antar-Perangkat Daerah maupun dengan aktor non-pemerintah. Pada akhirnya, penggabungan sumber daya yang ada dari masing-masing aktor diharapkan akan mampu mendukung percepatan pembangunan di Kota Administrasi Jakarta Barat.

5) Isu Peningkatan kualitas pelayanan

Berdasarkan data kepuasan pelayanan, faktanya telah menandakan bahwa pelayanan di Kota Administrasi Jakarta Barat masih belum optimal. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemberdayaan, pengawasan, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat RT, RW, LMK, FKMD dan lainnya, agar ke depannya masyarakat akan lebih dekat dengan pemerintah.

6) Isu penataan dan pengembangan kawasan

Sebagaimana diamanatkan dalam Perda tentang RTRW 2030, Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan koridor-koridor pengembangan kawasan dan kewilayahan sebagaimana telah diuraikan di atas. Dalam konteks ini, sesuai dengan tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Barat bersama perangkatnya bertugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan kawasan tersebut bersama stakeholder terkait.

7) Isu penagihan kewajiban kepada pemilik SIPPT.

Hal ini terkait dengan kendala dalam penagihan kewajiban berupa fasos fasum sesuai dengan ketentuan dalam SIPPT. Salah satu kendala adalah diperlukan waktu yang cukup lama untuk proses penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai salah satu syarat mutlak dalam proses pemenuhan kewajiban fasos/fasum.

- 8) Isu belum cukup cepatnya waktu respon Camat dan Lurah saat terjadinya bencana/masalah sosial.

Hal ini terkait dengan masih rendahnya tingkat pemanfaatan Rumah Dinas Camat dan Lurah sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan data yang ada, dari 8 Kecamatan dan 56 Kelurahan, terdapat 3 (tiga) Kecamatan dan 14 (empat belas) Kelurahan tidak memiliki rumah dinas. Sementara dari 47 (empat puluh tujuh) Rumah Dinas Camat dan Lurah yang ada, sebanyak 46 (empat puluh enam) Rumah Dinas tidak ditempati oleh Camat dan Lurah (98%). Hal ini terjadi karena Rumah Dinas Camat dan Lurah umumnya dalam kondisi rusak berat maupun ringan yang disebabkan kondisi bangunan yang sudah tua. Rendahnya tingkat pemanfaatan Rumah Dinas oleh Camat dan Lurah dapat memengaruhi tingkat respon Camat dan Lurah dalam menangani permasalahan kewilayahan terutama di luar jam kedinasan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Berdasarkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul, Walikota Jakarta Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 4 (empat) tahun kedepan. Perencanaan Kinerja tersebut meliputi Tujuan dan Sasaran untuk jangka menengah.

4.1. Tujuan

Tujuan adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani permasalahan, isu strategis dan menjawab tujuan dan sasaran RPD. Sesuai dengan periodisasi dokumen Rencana Strategis yaitu empat tahunan, merupakan gambaran keinginan untuk mewujudkan kondisi yang menjadi tujuan pada masa 4 (empat) tahun yang akan datang. Adapun tujuan renstra Kota Administrasi Jakarta Barat dalam mendukung tujuan dan sasaran RPD adalah:

“Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal”

Keterkaitan tujuan kota Administrasi Jakarta Barat dengan Tujuan dan Sasaran RPD digambarkan dalam alur dibawah ini:

Tujuan keempat RPD
Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik Dan Manajemen
Pemerintahan Berintegritas



Sasaran Pertama dari Tujuan keempat RPD
Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan
Masyarakat



Tujuan Renstra Kota Administrasi Jakarta Barat
Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan
dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan
Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal

4.2. Sasaran Program Dan Indikator Kinerja Tahun 2023-2026

Sasaran adalah hasil yang diharapkan terwujud pada 4 (empat) tahun yang akan datang. Sasaran strategis Walikota Jakarta Barat merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun

dan dialokasikan dalam 4 (empat) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 4 (empat) tahun.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
1.	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	86,75	87,30	87,85	89,50	89,50
1.1		Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang Optimal	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kecamatan dan kelurahan	Nilai	88,50	88,60	88,70	88,80	88.80
			Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai	85,00	86,00	87,00	88,50	88,50

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Melihat dari permasalahan yang ada serta tujuan dan sasaran pada RPD yang dijabarkan kembali dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah, maka pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 4 (empat) tahun mendatang.

Definisi strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Walikota Jakarta Barat untuk mencapai sasaran, sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis di Kota Administrasi Jakarta Barat yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Berikut ini disajikan tabel yang dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar tujuan, sasaran RPD berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah, berikut tampilan tabel 5.1:

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program Kota Administrasi Jakarta Barat

Tujuan RPD 4 : Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik Dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas			
Sasaran RPD 4.1 : Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat			
Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang Optimal	1. Peningkatan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat serta Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, diantaranya melalui kegiatan PPSU, RT, RW,	1.1. Optimalisasi Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1.2. Optimalisasi Pelaksanaan Pemerintahan yang

Tujuan RPD 4 : Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik Dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas			
Sasaran RPD 4.1 : Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat			
Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA	Strategi	Arah Kebijakan
Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal		LMK dan FKDM	Dilimpahkan kepada Camat 1.3. Optimalisasi Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi 1.4. Optimalisasi Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten
		2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, diantaranya melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) Kelurahan dalam rangka Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya, Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu, Gerakan PKK, dan	2.1. Optimalisasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.2. Optimalisasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Tujuan RPD 4 : Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik Dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas			
Sasaran RPD 4.1 : Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat			
Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA	Strategi	Arah Kebijakan
		layanan RPTRA	
		3. Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Tiga Pilar (TNI, POLRI, Pemda) dalam Mewujudkan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.	3.1. Optimalisasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		4. Peningkatan Pengelolaan Kantor dan Kendaraan Operasional dalam Mendukung Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Pegawai	4.1. Optimalisasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.2. Optimalisasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.3. Optimalisasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.4. Optimalisasi Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.5. Optimalisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.6. Optimalisasi

Tujuan RPD 4 : Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik Dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas			
Sasaran RPD 4.1 : Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat			
Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA	Strategi	Arah Kebijakan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.7. Optimalisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5. Pengoordinasian, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi yang Optimal	5.1. Optimalisasi Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi 5.2. Optimalisasi Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan, Bidang Perekonomian dan Pembangunan. serta Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan kota Administrasi Jakarta Barat bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Adapun prioritas pembangunan tahun 2023-2026 sesuai dengan RPD tahun 2023-2026 dan RPJPD tahun 2005-2025 adalah mencapai Kota Jakarta yang berdaya saing global berlandaskan kapasitas sarana dan prasarana yang memadai, tata kelola pemerintahan yang baik, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta kapasitas inovasi daerah yang terus meningkat, yang dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta per tahun selama periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

Program-program yang dijabarkan dalam Bab ini merupakan program prioritas sesuai dengan hasil penjabaran isu-isu strategis. Program prioritas dikelompokkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang didukung, serta diintegrasikan dengan rumusan Kegiatan Strategis Daerah sebagai bagian dari keberlanjutan manfaat kebijakan pembangunan.

Kota Administrasi Jakarta Barat mendukung Program-program prioritas menurut tujuan, sasaran dan kegiatan strategis daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan daftar program menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diantaranya pada tujuan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan pada sasaran Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat.

Pelayanan Publik yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Instansi-Instansi atau Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik diwajibkan untuk memberikan pelayanan terbaik.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi salah satu tolak ukur bagi instansi pemerintah dalam melakukan evaluasi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat agar tetap prima. Seluruh instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan publik kepada masyarakat menjadikan nilai IKM sebagai parameter untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Pengukuran yang berkesinambungan untuk mengetahui kinerja pelayanan dan untuk memperoleh aspek pelayanan mana yang dianggap perlu oleh masyarakat dan menjadi prioritas guna memperbaiki kualitas layanan.

Sebagai upaya optimalisasi transparansi pelayanan publik, dalam mengukur tingkat capaian IKM Pemprov DKI Jakarta melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang berbasis dan menggunakan aplikasi Jakarta Kini (JAKI). Adapun pelaksanaan kegiatan SKM dan perhitungan nilai IKM tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Tahun 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Terdapat 9 (sembilan) unsur pelayanan yang dilakukan penilaian dalam pelaksanaan SKM, yaitu: (1) Persyaratan; (2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; (3) Waktu Penyelesaian; (4) Biaya/Tarif; (5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; (6) Kompetensi Pelaksana; (7) Perilaku Pelaksana; (8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; serta (9) Sarana dan Prasarana. Berdasarkan hasil SKM pada Tahun 2021, Kota Administrasi Jakarta Barat mendapat nilai 90.67 dan masuk pada mutu layanan “Sangat Baik”. Adapun untuk ke depannya, ditargetkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terus meningkat hingga pada tahun 2026 mencapai nilai 88,8 atau “Sangat Baik”.

Terdapat beberapa layanan publik di yang dilaksanakan oleh Kota Administrasi Jakarta Barat yang terkait dengan layanan kemasyarakatan. Layanan ini merupakan pelayanan yang berhubungan dengan sifat dan kepentingan yang lebih ditekankan kepada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, diantaranya melalui pelaksanaan:

1. Kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK;
2. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian penyakit demam berdarah dengue (DBD) dan chikungunya melalui pengerahan juru pemantau jentik (jumantik);
3. Pelaksanaan pos pelayanan terpadu (posyandu), melalui pemantauan tumbuh anak dan pemenuhan kecukupan gizi melalui pemberian makanan tambahan (PMT) bayi dan lansia;
4. Penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU), terutama pada sarana dan prasarana umum yang mendesak untuk ditangani;
5. Pengelolaan ruang interaksi warga/RPTRA;
6. Penyelenggaraan ketertiban umum; serta
7. Pengelolaan Kelurahan melalui penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM.

Di samping itu, Walikota sebagai Perangkat Daerah dengan tugas yang bersifat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kepada unsur perangkat/pelaksana teknis sektoral di wilayahnya, juga memiliki peran dalam menata kawasan. Penguatan peran Walikota dalam penataan kawasan ini dilakukan melalui koordinasi implementasi di masing-masing wilayah (fungsi lead actor), serta melaksanakan kolaborasi penuntasan target kegiatan strategis daerah prioritas (fungsi active supporting actor) seperti pengendalian banjir, pengurangan sampah, penataan kampung, pemulihan ekonomi pariwisata melalui pengembangan destinasi wisata urban, dan aktivasi city branding di masing-masing wilayah.

Dalam hal penataan kawasan, Walikota menjadi penanggung jawab di setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan serta evaluasi yang melibatkan multi urusan, multi stakeholders/ pemangku

kepentingan, multi tahun dan multi sumber pendanaan sehingga diharapkan keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keberlanjutan dari manfaat dan dampak dari suatu kawasan yang sudah selesai ditata dapat terwujud. Hingga Tahun 2026 ditargetkan jumlah kawasan yang tertata di Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak 2 (dua) lokasi, masing-masing pada tahun 2024 dan 2026. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, dilakukan beberapa upaya diantaranya pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala dan simulasi penataan Kawasan dengan seluruh PD/UKPD terkait pada setiap tahapan, kolaborasi dengan pihak swasta/masyarakat untuk mencari sumber pendanaan non-APBD, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan kawasan.

Berdasarkan uraian di atas, maka program prioritas 2023-2026 pada Kota Administrasi Jakarta Barat yang mendukung sasaran ini adalah:

1. Program Pengelolaan Kecamatan
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Secara terperinci, uraian program, kegiatan, subkegiatan, indikator beserta pagu indikatif disajikan dalam Tabel 6.1 di bawah ini:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.1	MENINGKATNYA KUALITAS, AKSESIBILITAS, DAN KEMUDAHAN LAYANAN MASYARAKAT															
1	TERWUJUDNYA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SEBAGAI KOTA PERDAGANGAN DAN JASA, BERBUDAYA SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG MEMBERIKAN LAYANAN PUBLIK DAN PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN LAYANAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai	0	86,75	590.200.618.355	87,3	621.438.025.317	87,85	631.337.733.067	89,5	652.544.443.693	89,5	2.495.520.820.432		
1.1	MENINGKATNYA KINERJA MELALUI KOORDINASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT YANG OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai	0	88,5	590.200.618.355	88,6	621.438.025.317	88,7	631.337.733.067	88,8	652.544.443.693	88,8	2.495.520.820.432		
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	4	490.192.319.616	4	518.382.674.647	4	525.151.519.263	4	543.198.843.552	4	2.076.925.357.078	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Indeks	4	4		4		4		4		4		BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRAS I JAKARTA BARAT	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	4	4	950.801.048	4	1.069.236.332	4	1.128.921.055	4	1.189.144.676	4	4.338.103.111	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1	950.801.048	1	1.069.236.332	1	1.128.921.055	1	1.189.144.676	4	4.338.103.111	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.01. 02.2. 04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai	4	4	266.191.093.442	4	279.241.509.389	4	292.682.779.476	4	306.860.332.760	4	1.144.975.715.067	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.01. 02.2. 04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12	266.191.093.442	12	279.241.509.389	12	292.682.779.476	12	306.860.332.760	48	1.144.975.715.067	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.01. 02.6. 02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Nilai	4	4	220.707.250.505	4	234.234.354.019	4	228.898.408.063	4	232.651.636.375	4	916.491.648.962	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.01. 02.6. 02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelompok Masyarakat	1135	26432	7.453.809.847	26542	7.766.050.160	26742	8.160.968.327	23294	8.541.484.968	103010	31.922.313.302	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.01. 02.6. 02.03	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Laporan	12	12	7.629.606.200	12	7.774.352.100	12	8.064.340.855	12	7.740.884.532	48	31.209.183.687	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA	DKI JAKARTA

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															BARAT	
7.01. 02.6. 02.04	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Lembag a	7662	7662	190.014.295.570	7662	192.497.202.360	7662	196.055.389.966	7662	199.172.498.526	7662	777.739.386.422	KELURAHAN DI LINGKUNGA N KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.01. 02.6. 02.05	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Laporan	4	4	6.314.181.563	4	6.585.826.408	4	6.838.768.648	4	7.076.360.058	16	26.815.136.677	KELURAHAN DI LINGKUNGA N KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.01. 02.6. 02.06	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Laporan	1	1	5.797.718.729	1	5.982.192.873	1	6.186.292.593	1	6.325.997.823	4	24.292.202.018	KELURAHAN DI LINGKUNGA N KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.01. 02.6. 02.07	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Laporan	1	1	979.969.813	1	1.046.874.162	1	1.104.419.822	1	1.191.230.891	4	4.322.494.688	KELURAHAN DI LINGKUNGA N KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.01. 02.6. 02.08	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Laporan	0	0	345.000.000	1	10.258.963.700	0	75.000.000	0	85.000.000	1	10.763.963.700	KELURAHAN DI LINGKUNGA N KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01. 02.6. 02.09	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Laporan	0	1	2.172.668.783	1	2.322.892.256	1	2.413.227.852	1	2.518.179.577	4	9.426.968.468	KELURAHAN DI LINGKUNGA N KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.01. 02.6. 04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten	Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai	4	4	2.343.174.621	4	3.837.574.907	4	2.441.410.669	4	2.497.729.741	4	11.119.889.938	KECAMATAN DI LINGKUNGA N KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.01. 02.6. 04.01	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Laporan	12	12	1.571.184.100	12	1.603.772.182	12	1.638.816.031	12	1.676.530.562	48	6.490.302.875	KECAMATAN DI LINGKUNGA N KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.01. 02.6. 04.02	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Laporan	4	4	360.458.560	4	366.186.988	4	372.332.137	4	378.930.375	16	1.477.908.060	KECAMATAN DI LINGKUNGA N KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.01. 02.6. 04.03	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Laporan	1	1	411.531.961	1	418.351.737	1	430.262.501	1	442.268.804	4	1.702.415.003	KECAMATAN DI LINGKUNGA N KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.01. 02.6. 04.04	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat	Laporan	0	0	0	1	1.449.264.000	0	0	0	0	1	1.449.264.000	KECAMATAN DI LINGKUNGA N KOTA	DKI JAKARTA

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kecamatan													ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.01. 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	Indeks	4	4	97.352.396.618	4	100.284.428.367	4	103.331.290.341	4	106.426.281.495	4	407.394.396.821	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.01. 03.2. 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai	4	4	79.435.992.326	4	81.782.112.415	4	84.304.299.371	4	86.922.441.049	4	332.444.845.161	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.01. 03.2. 02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	906	1243	79.435.992.326	1243	81.782.112.415	1243	84.304.299.371	1243	86.922.441.049	1243	332.444.845.161	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.01. 03.2. 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Nilai	4	4	17.916.404.292	4	18.502.315.952	4	19.026.990.970	4	19.503.840.446	4	74.949.551.660	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	64	64	13.539.274.311	64	14.110.394.272	64	14.604.888.006	64	15.047.747.134	64	57.302.303.723	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	0	1044	4.377.129.981	1043	4.391.921.680	1043	4.422.102.964	909	4.456.093.312	4039	17.647.247.937	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Indeks	4	4	2.655.902.121	4	2.770.922.303	4	2.854.923.463	4	2.919.318.646	4	11.201.066.533	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01. 04.2. 01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan	Persen	0	100	2.655.902.121	100	2.770.922.303	100	2.854.923.463	100	2.919.318.646	100	11.201.066.533	KECAMATAN DI LINGKUNGA N KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
															KELURAHANDI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.01. 04.2. 01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	4	2.655.902.121	4	2.770.922.303	4	2.854.923.463	4	2.919.318.646	16	11.201.066.533	KECAMATAN DI LINGKUNGA N KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
1	TERWUJUDNYA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SEBAGAI KOTA PERDAGANGAN DAN JASA, BERBUDAYA SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG MEMBERIKAN LAYANAN PUBLIK DAN PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN LAYANAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai	0	86,75	351.573.156.068	87,3	343.496.293.610	87,85	341.425.921.096	89,5	337.583.517.085	89,5	1.374.078.887.859		

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.1	MENINGKATNYA KINERJA MELALUI KOORDINASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT YANG OPTIMAL	INDEKS EFEKTIFITAS KOORDINASI KOTA ADMINISTRASI	Nilai	0	85	351.573.156.068	86	343.496.293.610	87	341.425.921.096	88,5	337.583.517.085	88,5	1.374.078.887.859		
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik	Persen	41,74	51,3	348.687.806.139	57,39	340.697.781.125	61,74	338.349.947.521	66,09	334.606.888.656	66,09	1.362.342.423.441	BAGIAN PEMERINTAHAN	DKI JAKARTA
															BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4		4		4		4		4		BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
															BAGIAN KEUANGAN	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	4	4	235.465.926.465	4	224.525.395.886	4	217.707.694.017	4	207.997.671.295	4	885.696.687.663	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	654	598	234.908.092.812	571	223.940.812.812	558	217.105.572.812	534	207.374.892.812	2261	883.329.371.248	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
7.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	65	557.833.653	65	584.583.074	65	602.121.205	65	622.778.483	260	2.367.316.415	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai	4	4	225.500.000	4	236.500.000	4	247.500.000	4	258.500.000	4	968.000.000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.02. 01.1. 03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokume n	0	1	225.500.000	1	236.500.000	1	247.500.000	1	258.500.000	4	968.000.000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02. 01.1. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	4	4	855.633.590	4	848.799.469	4	835.854.612	4	875.308.849	4	3.415.596.520	BAGIAN KEPEGAWAIA N, KETATALAKS ANAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02. 01.1. 05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	0	31	345.000.000	32	316.190.200	28	280.449.880	25	295.949.880	116	1.237.589.960	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA	

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															BARAT	
7.02. 01.1. 05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	12	510.633.590	12	532.609.269	12	555.404.732	12	579.358.969	48	2.178.006.560	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02. 01.1. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	4	4	19.602.383.837	4	20.142.905.948	4	21.214.808.085	4	22.313.038.536	4	83.273.136.406	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02. 01.1. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	65	65	893.495.910	65	893.495.910	65	982.845.501	65	982.845.501	260	3.752.682.822	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.02. 01.1. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	142	5.887.095.079	141	5.951.575.526	142	6.364.665.236	141	6.684.410.373	566	24.887.746.214	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02. 01.1. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	60	103	1.231.109.268	102	1.268.264.562	101	1.308.938.294	102	1.499.029.874	408	5.307.341.998	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02. 01.1. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	62	1.116.030.614	62	1.185.715.182	62	1.249.907.207	62	1.327.709.654	248	4.879.362.657	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02. 01.1.	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan	Paket	0	107	1.102.645.252	108	1.133.918.528	107	1.212.557.695	107	1.257.413.266	429	4.706.534.741	BAGIAN UMUM DAN	DKI JAKARTA

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
06.05	Penggandaan	dan Penggandaan yang Disediakan													PROTOKOL	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02. 01.1. 06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	220	5.730.940.312	220	5.963.467.545	219	6.203.396.015	226	6.481.963.561	885	24.379.767.433	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02. 01.1. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4	2.725.312.401	4	2.821.405.709	4	2.941.699.631	4	3.103.579.041	16	11.591.996.782	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02. 01.1. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	4	613.478.600	4	624.696.510	4	636.805.119	4	652.889.562	16	2.527.869.791	BAGIAN PEMBANGUN AN DAN LINGKUNGA N HIDUP	DKI JAKARTA
															BAGIAN PEMERINTAHAN	
															BAGIAN PEREKONOMIAN	

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	1	101.520.000	1	106.596.000	1	111.925.800	1	117.522.090	4	437.563.890	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
7.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	1	200.756.401	1	193.770.476	1	202.067.587	1	205.675.614	4	802.270.078	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	4	4	12.421.110.741	4	11.096.164.629	4	10.484.212.699	4	10.936.523.035	4	44.938.011.104	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02. 01.1. 07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	77	930.355.380	41	1.015.894.278	37	664.842.844	73	624.342.844	228	3.235.435.346	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															BAGIAN PEMERINTAHAN	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02. 01.1. 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	282	2.897.267.242	223	2.072.668.086	213	2.029.224.470	220	2.189.911.188	938	9.189.070.986	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02. 01.1. 07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	7	6.761.285.823	10	6.024.400.914	10	5.996.218.750	10	6.268.036.584	37	25.049.942.071	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															BAGIAN PEMERINTAHAN	

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.02. 01.1. 07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	25	1.242.861.000	24	1.424.279.050	22	1.339.495.503	23	1.414.683.028	94	5.421.318.581	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02. 01.1. 07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	156	589.341.296	154	558.922.301	144	454.431.132	142	439.549.391	596	2.042.244.120	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02. 01.1. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	4	4	50.243.558.338	4	52.616.172.435	4	55.014.229.981	4	57.441.856.474	4	215.315.817.228	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	1.400.515.402	12	1.442.192.756	12	1.484.953.976	12	1.528.853.258	48	5.856.515.392	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	24.126.525.892	12	25.291.880.952	12	26.421.168.626	12	27.534.948.873	48	103.374.524.343	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	3.046.722.553	4	3.151.071.753	4	3.264.162.020	4	3.370.607.978	16	12.832.564.304	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.02. 01.1. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	21.669.794.491	12	22.731.026.974	12	23.843.945.359	12	25.007.446.365	48	93.252.213.189	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02. 01.1. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	4	4	29.873.693.168	4	31.231.842.758	4	32.845.648.127	4	34.783.990.467	4	128.735.174.520	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02. 01.1. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	445	445	5.204.390.301	445	5.446.251.900	445	5.780.890.510	445	6.120.825.577	445	22.552.358.288	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.02. 01.1. 09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	408	350.789.863	379	384.412.736	312	343.501.434	349	356.420.907	1448	1.435.124.940	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															BAGIAN PEMERINTAHAN	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02. 01.1. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	1131	2.528.392.204	1150	2.665.959.875	1155	2.813.279.516	1154	2.948.445.387	4590	10.956.076.982	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02. 01.1. 09.09	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Unit	0	85	9.461.416.468	86	9.644.961.011	84	10.131.899.515	86	10.872.666.372	341	40.110.943.366	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															BAGIAN PEMERINTAHAN	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.02. 01.1. 09.10	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Unit	0	69	6.164.352.166	64	6.545.128.618	64	6.888.038.576	65	7.242.816.112	262	26.840.335.472	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															BAGIAN PEMERINTAHAN	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02. 01.1. 09.11	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Unit	0	69	6.164.352.166	64	6.545.128.618	64	6.888.038.576	65	7.242.816.112	262	26.840.335.472	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															BAGIAN PEMERINTAHAN	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02. 02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	Nilai	0	85	2.885.349.929	86	2.798.512.485	87	3.075.973.575	88,5	2.976.628.429	88,5	11.736.464.418	BAGIAN PEMERINTAH AN	DKI JAKARTA
															BAGIAN HUKUM	

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai	0	85		86		87		88,5		88,5		BAGIAN PEREKONOMIAN	
															BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai	0	85		86		87		88,5		88,5		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi yang di Atas 80%	Persen	100	100	2.885.349.929	100	2.798.512.485	100	3.075.973.575	100	2.976.628.429	100	11.736.464.418	BAGIAN KEPEGAWAIA N, KETATALAKS ANAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA
															BAGIAN PEREKONOMIAN	
															BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
															BAGIAN KEUANGAN	
															BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
															BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
															BAGIAN PEMERINTAHAN	
		Persentase Perkara/Sengketa Hukum yang ditindaklanjuti	Persen	100	100		100		100		100		100		BAGIAN HUKUM	
7.02.02.6.03.01	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Lembag a	7662	1915	40.000.000	1915	40.000.000	1916	40.000.000	1916	40.000.000	7662	160.000.000	BAGIAN PEMERINTAH AN	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.02	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengurusan Perkara di Pengadilan	Dokume n	0	4	112.559.000	4	122.538.900	4	127.172.790	4	138.570.069	16	500.840.759	BAGIAN HUKUM	DKI JAKARTA

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tingkat Kota Administrasi														
7.02. 02.6. 03.03	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Dokume n	0	4	14.850.000	4	16.335.000	4	17.968.500	4	19.765.350	16	68.918.850	BAGIAN HUKUM	DKI JAKARTA
7.02. 02.6. 03.04	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Dokume n	0	4	10.380.000	4	11.238.000	4	12.181.800	4	13.219.980	16	47.019.780	BAGIAN HUKUM	DKI JAKARTA
7.02. 02.6. 03.05	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Dokume n	0	1	3.945.000	1	4.159.500	1	4.395.450	1	4.654.995	4	17.154.945	BAGIAN HUKUM	DKI JAKARTA
7.02. 02.6. 03.06	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi	Jumlah Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi yang Disusun	Laporan	4	4	16.250.000	4	16.250.000	4	16.250.000	4	16.250.000	16	65.000.000	BAGIAN KEPEGAWAIA N, KETATALAKS ANAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA
7.02. 02.6. 03.07	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi yang Disusun	Laporan	1	1	9.750.000	1	9.750.000	1	9.750.000	1	9.750.000	4	39.000.000	BAGIAN KEPEGAWAIA N, KETATALAKS ANAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.02. 02.6. 03.08	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Dokumen	4	4	6.500.000	4	6.500.000	4	6.500.000	4	6.500.000	16	26.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN	DKI JAKARTA
7.02. 02.6. 03.09	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Dokumen	0	4	631.046.504	4	644.566.340	4	695.149.290	4	695.149.290	16	2.665.911.424	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
7.02. 02.6. 03.10	Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Dokumen	0	4	498.876.000	4	498.876.000	4	576.876.000	4	576.876.000	16	2.151.504.000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
7.02. 02.6. 03.11	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	13.000.000	2	13.000.000	2	13.000.000	2	13.000.000	8	52.000.000	BAGIAN KESEJAHTER AAN RAKYAT	DKI JAKARTA
7.02. 02.6. 03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	5.328.000	2	5.760.000	2	6.048.000	2	6.480.000	8	23.616.000	BAGIAN KESEJAHTER AAN RAKYAT	DKI JAKARTA
7.02. 02.6. 03.13	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	13.000.000	2	13.000.000	2	13.000.000	2	13.000.000	8	52.000.000	BAGIAN KESEJAHTER AAN RAKYAT	DKI JAKARTA

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.02. 02.6. 03.14	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Dokumen	1	1	3.900.000	1	3.900.000	1	3.900.000	1	3.900.000	4	15.600.000	BAGIAN KESEJAHTERAN RAKYAT	DKI JAKARTA
7.02. 02.6. 03.15	Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Dokumen	1	1	57.029.500	1	57.029.500	1	57.029.500	1	57.029.500	4	228.118.000	BAGIAN PEMERINTAHAN	DKI JAKARTA
7.02. 02.6. 03.16	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Dokumen	1	1	14.050.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	59.050.000	BAGIAN PEMERINTAHAN	DKI JAKARTA
7.02. 02.6. 03.18	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Dokumen	4	4	7.200.000	4	7.920.000	4	8.640.000	4	9.360.000	16	33.120.000	BAGIAN PEMERINTAHAN	DKI JAKARTA
7.02. 02.6. 03.20	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	Dokumen	1	1	2.340.000	1	2.340.000	1	3.042.000	1	3.042.000	4	10.764.000	BAGIAN PEMERINTAHAN	DKI JAKARTA
7.02. 02.6. 03.22	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	Dokumen	4	4	35.750.000	4	35.750.000	4	35.750.000	4	35.750.000	16	143.000.000	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	DKI JAKARTA

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.02. 02.6. 03.24	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi yang Disusun dan dievaluasi	Dokume n	2	2	7.800.000	2	7.800.000	2	7.800.000	2	7.800.000	8	31.200.000	BAGIAN KEPEGAWAIA N, KETATALAKS ANAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA
7.02. 02.6. 03.25	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Dokume n	4	4	26.000.000	4	32.500.000	4	39.000.000	4	45.500.000	16	143.000.000	BAGIAN KEPEGAWAIA N, KETATALAKS ANAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA
7.02. 02.6. 03.26	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Dokume n	1	1	5.200.000	1	7.800.000	1	10.400.000	1	13.000.000	4	36.400.000	BAGIAN KEPEGAWAIA N, KETATALAKS ANAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA
7.02. 02.6. 03.27	Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi yang Dilaksanakan	Dokume n	1	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	4	52.000.000	BAGIAN KEPEGAWAIA N, KETATALAKS ANAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA
7.02. 02.6. 03.28	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Dokume n	4	4	5.400.000	4	5.400.000	4	5.400.000	4	5.400.000	16	21.600.000	BAGIAN KEPEGAWAIA N, KETATALAKS ANAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.02. 02.6. 03.32	Keikutsertaan Pemerintah Kota Administrasi pada Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Laporan Partisipasi Pemerintah Kota Administrasi pada Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Laporan	0	1	478.949.700	1	354.844.700	1	478.949.700	1	354.844.700	4	1.667.588.800	BAGIAN KESEJAHTER AAN RAKYAT	DKI JAKARTA
7.02. 02.6. 03.36	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi yang Disusun	Dokume n	1	1	6.038.720	1	6.038.720	1	6.038.720	1	6.038.720	4	24.154.880	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
7.02. 02.6. 03.37	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Dokume n	4	4	519,68	4	528	4	544	4	560	16	2.151.680	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
7.02. 02.6. 03.38	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Dokume n	4	4	7.020.000	4	7.020.000	4	7.020.000	4	7.020.000	16	28.080.000	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
7.02. 02.6. 03.39	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Dokume n	12	12	701.192.825	12	701.192.825	12	701.192.825	12	701.192.825	48	2.804.771.300	BAGIAN PEMERINTAH AN	DKI JAKARTA
7.02. 02.6. 03.40	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Laporan	2	2	45.500.000	2	45.500.000	2	52.000.000	2	52.000.000	8	195.000.000	BAGIAN KESEJAHTER AAN RAKYAT	DKI JAKARTA
7.02. 02.6. 03.42	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Dokume n	4	4	27.000.000	4	27.000.000	4	27.000.000	4	27.000.000	16	108.000.000	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
7.02. 02.6. 03.44	Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data	Dokume n	4	4	35.750.000	4	35.750.000	4	35.750.000	4	35.750.000	16	143.000.000	BAGIAN PEMBANGUN AN DAN LINGKUNGA N HIDUP	DKI JAKARTA

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		SIPPT Kota Administrasi														
7.02. 02.6. 03.45	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	Dokume n	4	4	14.625.000	4	14.625.000	4	14.625.000	4	14.625.000	16	58.500.000	BAGIAN PEREKONOM IAN	DKI JAKARTA
7.02. 02.6. 03.46	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Dokume n	4	4	15.600.000	4	15.600.000	4	15.600.000	4	15.600.000	16	62.400.000	BAGIAN KESEJAHTER AAN RAKYAT	DKI JAKARTA

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan

NO	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal pada Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Akhir Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Definisi: Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi. Formulasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi.	Nilai		86,75	87,30	87,85	89,50	89,50
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Definisi: Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan	Nilai		88,50	88,60	88,70	88,80	88.80

NO	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal pada Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM). Formulasi Pengukuran: Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65.00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM								

NO	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal pada Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Akhir Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi agregasi capaian Kecamatan dan kemudian agregasi kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan.							
3	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	Definisi: Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat. Formulasi Pengukuran: Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi	Nilai		85,00	86,00	87,00	88,50	88,50

NO	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal pada Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		didapatkan melalui agregat hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi.								
4	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Definisi: Hasil survey terhadap Kepuasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM) Formulasi Pengukuran: Kelurahan : Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM) dengan penilaian mempedomani tata cara survei dan penilaian pada Permenpan No 14 Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,54-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,07-3,33 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,06 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,59 atau nilai interval konversi 25,00-64,99 Kecamatan : Agregat	Indeks	4	4	4	4	4	4	

NO	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal pada Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		Indeks Kepuasan Masyarat Kelurahan Kota : Agregat Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan								
5	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Definisi: Hasil survey terhadap Kepuasan Masyarakat pada Kegiatan Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) Formulasi Pengukuran: Kelurahan : Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kegiatan Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) dengan penilaian mempedomani tata cara survei dan penilaian pada Permenpan No 14 Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,54-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,07-3,33 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,06 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,59 atau nilai interval konversi 25,00-64,99 Kecamatan : Agregat Indeks Kepuasan Masyarat Kelurahan Kota : Agregat Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Indeks	4	4	4	4	4	4	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Definisi: Hasil survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK,	Indeks	4	4	4	4	4	4	

NO	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal pada Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan RPTRA. Formulasi Pengukuran: Kelurahan : Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan layanan Ruang Interaksi Warga dengan penilaian mempedomani tata cara survei dan penilaian pada Permenpan No 14 Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,54-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,07-3,33 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,06 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,59 atau nilai interval konversi 25,00-64,99 Kecamatan : Agregat Indeks Kepuasan Masyarat Kelurahan Kota : Agregat Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan								
7	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Definisi: Hasil survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum Formulasi Pengukuran: Kelurahan : Survey Indeks Kepuasan	Indeks	4	4	4	4	4	4	

NO	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal pada Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Akhir Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Ketertiban Umum	Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum dengan penilaian mempedomani tata cara survei dan penilaian pada Permenpan No 14 Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,54-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,07-3,33 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,06 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,59 atau nilai interval konversi 25,00-64,99 Kecamatan : Agregat Indeks Kepuasan Masyarat Kelurahan Kota : Agregat Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan							
8	Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik	Definsi: Hasil perhitungan terhadap persentase jumlah gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam kondisi baik Formulasi pengukuran: Jumlah Gedung Kantor dan Rumah Dinas dalam kondisi baik dibandingkan dengan jumlah gedung kantor dan Rumah Dinas dibawah Kewenangan Kota Administrasi X 100% Gedung kantor dan rumah dinas dalam kondisi baik: - Gedung dalam kondisi prima dan tidak memerlukan pemeliharaan; - Gedung yang telah	Persen	41.74	51.3	57.39	61.74	66.09	66.09

NO	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal pada Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Akhir Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		berfungsi prima setelah dilakukan pemeliharaan/rehab ringan; - Gedung yang telah berfungsi prima setelah dilakukan rehab/pembangunan berdasarkan hasil rekomtek dari Dinas Cipta Karya ,Tata Ruang dan Pertanahan.							
9	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Definisi: Hasil pengukuran kepuasan terhadap seluruh kegiatan layanan kantor dan KDO melalui kegiatan survey kepada pegawai. Hasil survey berupa indeks dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Formulasi Pengukuran: Survei dilakukan kepada Pegawai dengan mengisi kuesioner kepuasan pelayanan kantor dan KDO yang dilakukan pada triwulan keempat dengan mempedomani tata cara survei dan penilaian pada Permenpan No 14 Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,54-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,07-3,33 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,06 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,59 atau nilai interval konversi 25,00-64,99	Indeks	4	4	4	4	4	4

NO	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal pada Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
10	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	Definisi: Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD terkait di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, diantaranya dalam upaya tindak lanjut sengketa hukum pertanahan/perkara hukum, koordinasi pencapaian nilai Kota Peduli HAM, penanggulangan bencana, dan koordinasi lainnya. Formulasi Pengukuran: Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Bidang Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui pelaksanaan survei kepuasan, dengan responden Kepala UKPD terkait di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi, diantaranya dalam upaya tindak lanjut sengketa pertanahan/perkara hukum, koordinasi pencapaian nilai Kota Peduli HAM, dan koordinasi lainnya. Survei dilakukan pada triwulan keempat dengan mempedomani tata cara survei dan penilaian pada Permenpan No 14 Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,54-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil	Nilai	0	85	86	87	88.5	88.5	

NO	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal pada Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Akhir Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		survey 3,07-3,33 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,06 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,59 atau nilai interval konversi 25,00-64,99							
11	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Definisi: Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD terkait di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang perekonomian dan pembangunan, diantaranya dalam upaya pencapaian target kewirausahaan baru, penataan kawasan, dan koordinasi lainnya. Formulasi Pengukuran: Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui pelaksanaan survei kepuasan, dengan responden Kepala UKPD terkait di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi, diantaranya dalam upaya pencapaian target kewirausahaan baru, penataan kawasan, dan koordinasi lainnya. Survei dilakukan pada triwulan keempat dengan mempedomani tata cara survei dan penilaian pada	Nilai	0	85	86	87	88.5	88.5

NO	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal pada periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Akhir Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Permenpan No 14 Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,54-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,07-3,33 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,06 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,59 atau nilai interval konversi 25,00-64,99							
12	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Definisi: Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD terkait di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang administrasi dan kesejahteraan rakyat, diantaranya dalam upaya pencapaian target Kota Sehat, Kota Layak Anak, penanggulangan kemiskinan, Pelaksanaan BOP dan BOS, dan koordinasi lainnya. Formulasi Pengukuran: Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui pelaksanaan survei kepuasan, dengan responden Kepala UKPD terkait di masing-masing Kota/Kabupaten	Nilai	0	85	86	87	88.5	88.5

NO	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal pada Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Akhir Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Administrasi, diantaranya dalam pencapaian target Kota Sehat, Kota Layak Anak, penanggulangan kemiskinan, Pelaksanaan BOP dan BOS, dan koordinasi lainnya. Survei dilakukan pada triwulan keempat dengan mempedomani tata cara survei dan penilaian pada Permenpan No 14 Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,54-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,07-3,33 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,06 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,59 atau nilai interval konversi 25,00-64,99							

BAB VIII**PENUTUP**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Barat 2023-2026 berisikan kebijakan jangka menengah transisi sampai dengan periode perencanaan jangka menengah hasil dari pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024-2025. Renstra ini merupakan penjabaran kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang diamanatkan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Renstra ini dijabarkan ke dalam program pembangunan yang diuraikan melalui kegiatan serta subkegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut sebagai bentuk usaha mewujudkan tujuan dan sasaran RPD.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah. Maka dari itu diperlukannya penyusunan Renstra yang berisikan beberapa instrument, antara lain organisasi perangkat dan sumber daya manusia. Sehingga implementasi Renstra dapat mencapai hasil yang optimal selama 4 (empat) tahun kedepan. Renstra merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja. Oleh sebab itu, Rencana Kerja harus disesuaikan dengan Renstra ini dan penyusunan Renstra ini harus mengacu kepada RPD 4 (empat) tahun berjalan.

Berhasilnya implementasi Renstra sangat bergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya dari seluruh perangkat pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat serta dukungan masyarakat. Maka dari itu, seluruh perangkat pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat perlu menjalankan tugas dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah dijabarkan dalam Renstra ini, yaitu dengan bertanggungjawab dan berkomitmen tinggi untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-

masing unit kerja, yang selanjutnya menjadi satu tujuan strategis Kota Administrasi Jakarta Barat.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,

The image shows a circular official stamp of the Mayor of Kota Administrasi Jakarta Barat. The stamp contains the text "WALIKOTA" at the top and "KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT" at the bottom, with a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Yani Wahyu Purwoko, A.P., M.Si.

NIP 197302241993111001

TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.1	MENINGKATNYA KUALITAS, AKSESIBILITAS, DAN KEMUDAHAN LAYANAN MASYARAKAT															
1	TERWUJUDNYA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SEBAGAI KOTA PERDAGANGAN DAN JASA, BERBUDAYA SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG MEMBERIKAN LAYANAN PUBLIK DAN PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN LAYANAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai	0	86,75	590.200.618.355	87,3	621.438.025.317	87,85	631.337.733.067	89,5	652.544.443.693	89,5	2.495.520.820.432		
1.1	MENINGKATNYA KINERJA MELALUI KOORDINASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT YANG OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai	0	88,5	590.200.618.355	88,6	621.438.025.317	88,7	631.337.733.067	88,8	652.544.443.693	88,8	2.495.520.820.432		
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	4	490.192.319.616	4	518.382.674.647	4	525.151.519.263	4	543.198.843.552	4	2.076.925.357.078	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Indeks	4	4		4		4		4		4		BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	

TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	4	4	950.801.048	4	1.069.236.332	4	1.128.921.055	4	1.189.144.676	4	4.338.103.111	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1	950.801.048	1	1.069.236.332	1	1.128.921.055	1	1.189.144.676	4	4.338.103.111	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai	4	4	266.191.093.442	4	279.241.509.389	4	292.682.779.476	4	306.860.332.760	4	1.144.975.715.067	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12	266.191.093.442	12	279.241.509.389	12	292.682.779.476	12	306.860.332.760	48	1.144.975.715.067	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Nilai	4	4	220.707.250.505	4	234.234.354.019	4	228.898.408.063	4	232.651.636.375	4	916.491.648.962	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.01.02.6.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelompok Masyarakat	1135	26432	7.453.809.847	26542	7.766.050.160	26742	8.160.968.327	23294	8.541.484.968	103010	31.922.313.302	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.01.02.6.02.03	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Laporan	12	12	7.629.606.200	12	7.774.352.100	12	8.064.340.855	12	7.740.884.532	48	31.209.183.687	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.01.02.6.02.04	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Lembaga	7662	7662	190.014.295.570	7662	192.497.202.360	7662	196.055.389.966	7662	199.172.498.526	7662	777.739.386.422	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA

TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.02.6.02.05	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Laporan	4	4	6.314.181.563	4	6.585.826.408	4	6.838.768.648	4	7.076.360.058	16	26.815.136.677	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.01.02.6.02.06	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Laporan	1	1	5.797.718.729	1	5.982.192.873	1	6.186.292.593	1	6.325.997.823	4	24.292.202.018	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.01.02.6.02.07	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Laporan	1	1	979.969.813	1	1.046.874.162	1	1.104.419.822	1	1.191.230.891	4	4.322.494.688	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.01.02.6.02.08	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Laporan	0	0	345.000.000	1	10.258.963.700	0	75.000.000	0	85.000.000	1	10.763.963.700	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.01.02.6.02.09	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Laporan	0	1	2.172.668.783	1	2.322.892.256	1	2.413.227.852	1	2.518.179.577	4	9.426.968.468	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten	Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai	4	4	2.343.174.621	4	3.837.574.907	4	2.441.410.669	4	2.497.729.741	4	11.119.889.938	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.01.02.6.04.01	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Laporan	12	12	1.571.184.100	12	1.603.772.182	12	1.638.816.031	12	1.676.530.562	48	6.490.302.875	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.01.02.6.04.02	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Laporan	4	4	360.458.560	4	366.186.988	4	372.332.137	4	378.930.375	16	1.477.908.060	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.01.02.6.04.03	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Laporan	1	1	411.531.961	1	418.351.737	1	430.262.501	1	442.268.804	4	1.702.415.003	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.01.02.6.04.04	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Laporan	0	0	0	1	1.449.264.000	0	0	0	0	1	1.449.264.000	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	Indeks	4	4	97.352.396.618	4	100.284.428.367	4	103.331.290.341	4	106.426.281.495	4	407.394.396.821	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA

TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai	4	4	79.435.992.326	4	81.782.112.415	4	84.304.299.371	4	86.922.441.049	4	332.444.845.161	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	906	1243	79.435.992.326	1243	81.782.112.415	1243	84.304.299.371	1243	86.922.441.049	1243	332.444.845.161	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Nilai	4	4	17.916.404.292	4	18.502.315.952	4	19.026.990.970	4	19.503.840.446	4	74.949.551.660	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyar akatan	64	64	13.539.274.311	64	14.110.394.272	64	14.604.888.006	64	15.047.747.134	64	57.302.303.723	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyar akatan	0	1044	4.377.129.981	1043	4.391.921.680	1043	4.422.102.964	909	4.456.093.312	4039	17.647.247.937	KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Indeks	4	4	2.655.902.121	4	2.770.922.303	4	2.854.923.463	4	2.919.318.646	4	11.201.066.533	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	

TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan	Persen	0	100	2.655.902.121	100	2.770.922.303	100	2.854.923.463	100	2.919.318.646	100	11.201.066.533	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
															KELURAHANDI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	4	2.655.902.121	4	2.770.922.303	4	2.854.923.463	4	2.919.318.646	16	11.201.066.533	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
1	TERWUJUDNYA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SEBAGAI KOTA PERDAGANGAN DAN JASA, BERBUDAYA SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG MEMBERIKAN LAYANAN PUBLIK DAN PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN OPTIMAL	INDEKS KEPUASAN LAYANAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai	0	86,75	351.573.156.068	87,3	343.496.293.610	87,85	341.425.921.096	89,5	337.583.517.085	89,5	1.374.078.887.859		
1.1	MENINGKATNYA KINERJA MELALUI KOORDINASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT YANG OPTIMAL	INDEKS EFEKTIFITAS KOORDINASI KOTA ADMINISTRASI	Nilai	0	85	351.573.156.068	86	343.496.293.610	87	341.425.921.096	88,5	337.583.517.085	88,5	1.374.078.887.859		
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik	Persen	41,74	51,3	348.687.806.139	57,39	340.697.781.125	61,74	338.349.947.521	66,09	334.606.888.656	66,09	1.362.342.423.441	BAGIAN PEMERINTAHAN	DKI JAKARTA
															BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4		4		4		4		4		BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
															BAGIAN KEUANGAN	

TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	4	4	235.465.926.465	4	224.525.395.886	4	217.707.694.017	4	207.997.671.295	4	885.696.687.663	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	654	598	234.908.092.812	571	223.940.812.812	558	217.105.572.812	534	207.374.892.812	2261	883.329.371.248	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
7.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	65	557.833.653	65	584.583.074	65	602.121.205	65	622.778.483	260	2.367.316.415	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai	4	4	225.500.000	4	236.500.000	4	247.500.000	4	258.500.000	4	968.000.000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	1	225.500.000	1	236.500.000	1	247.500.000	1	258.500.000	4	968.000.000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	

TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	4	4	855.633.590	4	848.799.469	4	835.854.612	4	875.308.849	4	3.415.596.520	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	0	31	345.000.000	32	316.190.200	28	280.449.880	25	295.949.880	116	1.237.589.960	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	12	510.633.590	12	532.609.269	12	555.404.732	12	579.358.969	48	2.178.006.560	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	4	4	19.602.383.837	4	20.142.905.948	4	21.214.808.085	4	22.313.038.536	4	83.273.136.406	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	65	65	893.495.910	65	893.495.910	65	982.845.501	65	982.845.501	260	3.752.682.822	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	

TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	142	5.887.095.079	141	5.951.575.526	142	6.364.665.236	141	6.684.410.373	566	24.887.746.214	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	60	103	1.231.109.268	102	1.268.264.562	101	1.308.938.294	102	1.499.029.874	408	5.307.341.998	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	62	1.116.030.614	62	1.185.715.182	62	1.249.907.207	62	1.327.709.654	248	4.879.362.657	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	107	1.102.645.252	108	1.133.918.528	107	1.212.557.695	107	1.257.413.266	429	4.706.534.741	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	220	5.730.940.312	220	5.963.467.545	219	6.203.396.015	226	6.481.963.561	885	24.379.767.433	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	

TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4	2.725.312.401	4	2.821.405.709	4	2.941.699.631	4	3.103.579.041	16	11.591.996.782	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	4	613.478.600	4	624.696.510	4	636.805.119	4	652.889.562	16	2.527.869.791	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	DKI JAKARTA
															BAGIAN PEMERINTAHAN	
															BAGIAN PEREKONOMIAN	
															BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	1	101.520.000	1	106.596.000	1	111.925.800	1	117.522.090	4	437.563.890	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
7.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	1	200.756.401	1	193.770.476	1	202.067.587	1	205.675.614	4	802.270.078	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	4	4	12.421.110.741	4	11.096.164.629	4	10.484.212.699	4	10.936.523.035	4	44.938.011.104	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	

TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	77	930.355.380	41	1.015.894.278	37	664.842.844	73	624.342.844	228	3.235.435.346	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															BAGIAN PEMERINTAHAN	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	282	2.897.267.242	223	2.072.668.086	213	2.029.224.470	220	2.189.911.188	938	9.189.070.986	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	7	6.761.285.823	10	6.024.400.914	10	5.996.218.750	10	6.268.036.584	37	25.049.942.071	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															BAGIAN PEMERINTAHAN	
7.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	25	1.242.861.000	24	1.424.279.050	22	1.339.495.503	23	1.414.683.028	94	5.421.318.581	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	156	589.341.296	154	558.922.301	144	454.431.132	142	439.549.391	596	2.042.244.120	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	

TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	4	4	50.243.558.338	4	52.616.172.435	4	55.014.229.981	4	57.441.856.474	4	215.315.817.228	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	1.400.515.402	12	1.442.192.756	12	1.484.953.976	12	1.528.853.258	48	5.856.515.392	KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA
7.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	24.126.525.892	12	25.291.880.952	12	26.421.168.626	12	27.534.948.873	48	103.374.524.343	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	3.046.722.553	4	3.151.071.753	4	3.264.162.020	4	3.370.607.978	16	12.832.564.304	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	21.669.794.491	12	22.731.026.974	12	23.843.945.359	12	25.007.446.365	48	93.252.213.189	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	4	4	29.873.693.168	4	31.231.842.758	4	32.845.648.127	4	34.783.990.467	4	128.735.174.520	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA

TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	445	445	5.204.390.301	445	5.446.251.900	445	5.780.890.510	445	6.120.825.577	445	22.552.358.288	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	408	350.789.863	379	384.412.736	312	343.501.434	349	356.420.907	1448	1.435.124.940	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															BAGIAN PEMERINTAHAN	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	1131	2.528.392.204	1150	2.665.959.875	1155	2.813.279.516	1154	2.948.445.387	4590	10.956.076.982	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	85	9.461.416.468	86	9.644.961.011	84	10.131.899.515	86	10.872.666.372	341	40.110.943.366	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															BAGIAN PEMERINTAHAN	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	

TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	69	6.164.352.166	64	6.545.128.618	64	6.888.038.576	65	7.242.816.112	262	26.840.335.472	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															BAGIAN PEMERINTAHAN	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	69	6.164.352.166	64	6.545.128.618	64	6.888.038.576	65	7.242.816.112	262	26.840.335.472	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
															BAGIAN PEMERINTAHAN	
															KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
															KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	
7.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	Nilai	0	85	2.885.349.929	86	2.798.512.485	87	3.075.973.575	88,5	2.976.628.429	88,5	11.736.464.418	BAGIAN PEMERINTAHAN	DKI JAKARTA
															BAGIAN HUKUM	
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai	0	85		86		87		88,5		88,5		BAGIAN PEREKONOMIAN	
															BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai	0	85		86		87		88,5		88,5		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi yang di Atas 80%	Persen	100	100	2.885.349.929	100	2.798.512.485	100	3.075.973.575	100	2.976.628.429	100	11.736.464.418	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA
															BAGIAN PEREKONOMIAN	
															BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
															BAGIAN KEUANGAN	
															BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	

TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
															BAGIAN PEMERINTAHAN	
															BAGIAN HUKUM	
		Persentase Perkara/Sengketa Hukum yang ditindaklanjuti	Persen	100	100		100		100		100		100			
7.02.02.6.03.01	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Lembaga	7662	1915	40.000.000	1915	40.000.000	1916	40.000.000	1916	40.000.000	7662	160.000.000	BAGIAN PEMERINTAHAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.02	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	0	4	112.559.000	4	122.538.900	4	127.172.790	4	138.570.069	16	500.840.759	BAGIAN HUKUM	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.03	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	0	4	14.850.000	4	16.335.000	4	17.968.500	4	19.765.350	16	68.918.850	BAGIAN HUKUM	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.04	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	0	4	10.380.000	4	11.238.000	4	12.181.800	4	13.219.980	16	47.019.780	BAGIAN HUKUM	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.05	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Dokumen	0	1	3.945.000	1	4.159.500	1	4.395.450	1	4.654.995	4	17.154.945	BAGIAN HUKUM	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.06	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi	Jumlah Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi yang Disusun	Laporan	4	4	16.250.000	4	16.250.000	4	16.250.000	4	16.250.000	16	65.000.000	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.07	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi yang Disusun	Laporan	1	1	9.750.000	1	9.750.000	1	9.750.000	1	9.750.000	4	39.000.000	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.08	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Dokumen	4	4	6.500.000	4	6.500.000	4	6.500.000	4	6.500.000	16	26.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.09	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Dokumen	0	4	631.046.504	4	644.566.340	4	695.149.290	4	695.149.290	16	2.665.911.424	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.10	Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Dokumen	0	4	498.876.000	4	498.876.000	4	576.876.000	4	576.876.000	16	2.151.504.000	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.11	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	13.000.000	2	13.000.000	2	13.000.000	2	13.000.000	8	52.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	DKI JAKARTA

TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.02.02.6.03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	5.328.000	2	5.760.000	2	6.048.000	2	6.480.000	8	23.616.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.13	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	13.000.000	2	13.000.000	2	13.000.000	2	13.000.000	8	52.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.14	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Dokumen	1	1	3.900.000	1	3.900.000	1	3.900.000	1	3.900.000	4	15.600.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.15	Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Dokumen	1	1	57.029.500	1	57.029.500	1	57.029.500	1	57.029.500	4	228.118.000	BAGIAN PEMERINTAHAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.16	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Dokumen	1	1	14.050.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	59.050.000	BAGIAN PEMERINTAHAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.18	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Dokumen	4	4	7.200.000	4	7.920.000	4	8.640.000	4	9.360.000	16	33.120.000	BAGIAN PEMERINTAHAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.20	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	Dokumen	1	1	2.340.000	1	2.340.000	1	3.042.000	1	3.042.000	4	10.764.000	BAGIAN PEMERINTAHAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.22	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	Dokumen	4	4	35.750.000	4	35.750.000	4	35.750.000	4	35.750.000	16	143.000.000	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.24	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi yang Disusun dan dievaluasi	Dokumen	2	2	7.800.000	2	7.800.000	2	7.800.000	2	7.800.000	8	31.200.000	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.25	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	4	4	26.000.000	4	32.500.000	4	39.000.000	4	45.500.000	16	143.000.000	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA

TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.02.02.6.03.26	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	1	1	5.200.000	1	7.800.000	1	10.400.000	1	13.000.000	4	36.400.000	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.27	Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	4	52.000.000	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.28	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Dokumen	4	4	5.400.000	4	5.400.000	4	5.400.000	4	5.400.000	16	21.600.000	BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.32	Keikutsertaan Pemerintah Kota Administrasi pada Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Laporan Partisipasi Pemerintah Kota Administrasi pada Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi DKI Jakarta	Laporan	0	1	478.949.700	1	354.844.700	1	478.949.700	1	354.844.700	4	1.667.588.800	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.36	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi yang Disusun	Dokumen	1	1	6.038.720	1	6.038.720	1	6.038.720	1	6.038.720	4	24.154.880	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.37	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	4	4	519,68	4	528	4	544	4	560	16	2.151.680	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.38	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Dokumen	4	4	7.020.000	4	7.020.000	4	7.020.000	4	7.020.000	16	28.080.000	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.39	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Dokumen	12	12	701.192.825	12	701.192.825	12	701.192.825	12	701.192.825	48	2.804.771.300	BAGIAN PEMERINTAHAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.40	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Laporan	2	2	45.500.000	2	45.500.000	2	52.000.000	2	52.000.000	8	195.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.42	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Dokumen	4	4	27.000.000	4	27.000.000	4	27.000.000	4	27.000.000	16	108.000.000	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.44	Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Dokumen	4	4	35.750.000	4	35.750.000	4	35.750.000	4	35.750.000	16	143.000.000	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	DKI JAKARTA

TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DISERTAI PAGU INDIKATIF

PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

PERANGKAT DAERAH : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.02.02.6.03.45	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	Dokumen	4	4	14.625.000	4	14.625.000	4	14.625.000	4	14.625.000	16	58.500.000	BAGIAN PEREKONOMIAN	DKI JAKARTA
7.02.02.6.03.46	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Dokumen	4	4	15.600.000	4	15.600.000	4	15.600.000	4	15.600.000	16	62.400.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	DKI JAKARTA